



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 26 TAKALAR 92212  
LAMAM [www.takalarkab.go.id](http://www.takalarkab.go.id); POS ELEKTRONIK [pemkab@takalarkab.go.id](mailto:pemkab@takalarkab.go.id)

Yth. Bupati Takalar  
Cq. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kabupaten Takalar

Takalar, 23 Februari 2026

Di tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 045.21/344/Setda .

No.	Naskah yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen/ berkas Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025	1 (satu) Rangkap	Dikirim dengan hormat untuk bahan seperlunya



Sekretaris Daerah,

**ADE. MUHAMMAD HASBI, S.STP., M.AP., M.I.Kom**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810112 200012 1 001

Diterima tanggal :

Penerima : 23, 2 - 2026

Nama : BAKRI  
Nip : 19740510199701001  
Nomor Tlp: 081342 614 229



# PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Kalabbirang, Pattallassang, Takalar  
☎ 92211 ✉ takalarinspektorat@gmail.com

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Takalar, 11 Februari 2026

Plt. Inspektur Daerah,



**Drs. Muhammad Rusli, M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730513 199303 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAPORAN  
**KINERJA**  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhana Wata'ala, karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 ini dapat selesai tepat waktu. LKj disusun sebagai komitmen pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih, terbuka, akuntabel serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 yang memuat informasi kinerja yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dan menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai serta keterkaitannya dengan penggunaan anggaran untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kerjasama, evaluasi dan masukan sangat diharapkan dari berbagai pihak demi penyempurnaan LKj ini di masa yang akan datang.



Takalar, 06 Februari 2026

Sekretaris Daerah,

**DR. MUHAMMAD HASBI, S.STP, M.AP, MLKOM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/b

NIP. 19810112 200011 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	
1.3 Gambar Umum dan Organisasi .....	3
1.4 Isu Strategis .....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
2.1 Rencana Strategis .....	11
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	17
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja .....	23
3.3 Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV PENUTUP .....	37

## LAMPIRAN

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar  
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025  
Laporan hasil Evaluasi (LHE) RB 2025  
Laporan hasil Evaluasi (LHE) AKIP 2025  
Laporan hasil Evaluasi (LHE) LPPD 2025  
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)  
SK Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11.6097 Tahun 2025 tentang  
Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025  
Dokumentasi SPM  
Laporan hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Sekretariat Daerah

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	12
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	13
Tabel 2.3	Program, Pencapaian Sasaran Tahun 2025	14
Tabel 2.4	IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	15
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025	16
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025	17
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2025	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2	Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025	20
Tabel 3.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	21
Tabel 3.4	Capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025	22
Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi	23
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2023-2026	26
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional	27
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun Anggaran 2025	31
Tabel 3.11	Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat sebagai perwujudan dari konsistensi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Sebagai pedoman utama dalam penyusunan LKj, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dibuat dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua tujuan utama sekaligus. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, menjadikan laporan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dua tujuan utama LKj tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj oleh setiap instansi pemerintah

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 mencakup aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi yaitu menjadikan LKj 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025 di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025. Selain itu LKj mencakup aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing-masing satuan kerja dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar berupa perencanaan dan perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja serta target pencapaiannya. Selanjutnya, menghitung capaian kinerja dalam bentuk pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penyusunan LKj adalah melakukan analisis atas capaian kinerja dan analisis capaian keuangan dari kegiatan yang

dilaksanakan untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing capaian indikator kinerja yang diukur.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar telah dilengkapi dengan tugas dan fungsi jabatan struktural sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Lampiran I LKj ini.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Sekretariat sebagai berikut:

### **(1) Sekretaris Daerah**

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan membawahi bagian-bagian berikut ini:

#### **1. Bagian Tata Pemerintahan,**

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang pemerintahan, meliputi administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedaan tugas.

## **2. Bagian Kesejahteraan Rakyat,**

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Bagian Hukum**

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **(4) Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **1. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, Sekretariat Daerah dan Kepegawaian**

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Sub Bagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum melakukan perencanaan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan administrasi keuangan, anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah.

### **c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait urusan rumah tangga dan perlengkapan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Sub Bagian Protokol**

Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melakukan tata protokoler, koordinasi, informasi jadwal kegiatan Bupati dan wakil Bupati.

### **1.3.2 SUMBER DAYA SKPD**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sampai akhir tahun 2025 sebanyak 102 orang dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Magister (S2) sebanyak 26 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 57 orang dan SMA sebanyak 18 orang. Sementara berdasarkan pangkat dan golongan dapat diuraikan dengan golongan IV sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 67 orang dan golongan II sebanyak 12 orang. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar telah dilengkapi dengan tugas dan fungsi jabatan struktural sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, tentu saja terdapat hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar adalah antara lain bahwa Sekretaria Daerah Kabupaten Takalar adalah tempat bernaungnya pusat pemerintahan daerah yang banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis, komunikasi yang berlangsung sangat intens dengan pimpinan daerah sehingga proses pengambilan keputusan sangat

cepat dan efisien, sebagai *leading sector* dalam monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, berperan sebagai pengawas kinerja SKPD lain di Kabupaten Takalar serta sumberdaya manusia yang dimiliki sangat potensial. Sedangkan untuk kelemahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar antara lain masih seringnya terjadi persinggungan antara bagian akibat adanya egosentris yang menganggap bagian yang satu perannya lebih penting daripada yang lain, masih kurangnya koordinasi internal atau pun eksternal, tugas pokok dan fungsi yang terkadang bukan pada tempatnya dan tidak konsisten serta masih kurangnya tingkat kedisiplinan di kalangan PNS lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 adalah :

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2025 mendapat nilai BB dengan poin 71.00. Hal tersebut memacu Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2026 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai *leading sektor* dan seluruh Pemerintah Kabupaten Takalar. Tahun 2026 akan menjadi tahun lanjutan pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Takalar, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Takalar dimana Indikator Reformasi Birokrasi merupakan Indikator Tujuan Sekretariat Daerah pada Renstra 2025-2030.

Sehingga dapat dirumuskan isu strategis di Sekretariat Daerah, yaitu kualitas pelayanan belum maksimal karena prasarana, SDM, dan anggaran belum optimal.

#### 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan Publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Takalar. Inovasi yang dimaksud adalah **“TIPP (TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK) KABUPATEN TAKALAR MENUJU TAKALAR KABUPATEN SELALU BERINOVASI** yang berada pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Takalar, **TOGAMMARA'** (Taman Obat Keluarga Milik Masyarakat Sejahtera), Pos Cerdas Desa Massamaturu, **WISATA POLUT, ONE TABLE SERVICE, JALINAN KASIH TERDIDIK, PEJANTAN BERBAKAT, SIPAKAINGAN (SISTEM INFORMASI PETERNAKAN TAKALAR).**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (Empat) tahun, yaitu untuk tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar disusun sebagai kendali, tolok ukur dan sebagai alat untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah serta menjamin tercapainya sasaran Strategis pembangunan 4 (Empat) tahun mendatang.

Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis. Dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar 2023-2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan program).

#### **2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

Untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Takalar, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun adalah

- 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
- 2 Meningkatkan Tata Kelola pada Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja dan target kinerja untuk tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (2021)	Kondisi Kinerja pada akhir Renstra (2026)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	C	BB
2	Meningkatkan Tata Kelola pada Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Setda)	C	BB

#### 2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai untuk dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan.

Dengan Sasaran :

- 1.Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan
- 2.Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN

Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola pada Sekretariat Daerah.

Dengan Sasaran :

- 1.Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (2021)	Kondisi Kinerja pada akhir Renstra (2026)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	C (49,49)	BB (79-80)
2	Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	Nilai SAKIP Daerah	CC	A
		Nilai Evaluasi LPPD	3,07	3,50
		Indeks Inovasi Daerah	33	55
3	Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK	BAIK
		Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal	46,11	100
4	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Setda	Indeks RB Setda	C (49,49)	BB (79-80)
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	Nilai SAKIP Setda	CC	A

### 2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Administrasi Umum
2	Meningkatnya Perumusan dan Kualitas Evaluasi Kebijakan	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Administrasi Umum
3	Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	1. Program Perekonomian dan Pembangunan
4	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Setda	1. Program Administrasi Umum
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	1. Program Administrasi Umum

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4

## IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB
3	Nilai Evaluasi LPPD	Persen	3,40
4	Indeks Inovasi Daerah	Persen	50
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat	BAIK
6	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Persen	80-90
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB
8	Nilai SAKIP Setda	Predikat	BB

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU dan APBD.

Sebagai wujud komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2025, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani bersama oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dan Bupati Takalar (sebagaimana terlampir pada Lampiran I).

Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5

## Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	1	Indeks RB	Predikat	BB (76-78)
		2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB (71 – 80)
		3	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	3,40
		4	Indeks Inovasi Daerah	Persen	50
2	Meningkatnya Kualitas Adminstratif dan Pembinaan ASN	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	BAIK
		2	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Persen	80 – 90
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	1	Indeks RB	Predikat	BB (76 – 78)
		2	Nilai SAKIP Setda	Predikat	A

#### 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp48.516.776.150,10. Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (DBH Pajak Rokok) dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

## Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar TA 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	43.936.393.150,10
	- Belanja Pegawai	13.305.006.922,47
	- Belanja Barang dan Jasa	29.207.386.227,63
	- Belanja Hibah	1.424.000.000,00
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	4.580.383.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.516.776.150,10</b>

Anggaran Tahun 2025 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari 3 Program, 21 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

## Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	- Indeks RB - Nilai SAKIP Daerah - Nilai Evaluasi LPPD - Indeks Inovasi Daerah	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp47.048.791.680,10	96,97%

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	- Indeks Tata Kelola Pengadaan - Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Minimal	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp48.516.776.150,10	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	- Indeks RB Setda - Nilai SAKIP Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp41.393.848.060,10	85,32%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kembali perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi capaian kinerja yang merupakan evaluasi keberhasilan tujuan dan sasaran jangka menengah, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sesuai yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinera	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber Data: Permendagri 86 Tahun 2017

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Dalam Renstra terdapat 2 (dua) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) indikator Kinerja.

#### 2.1.1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.2  
Capaian Perjanjian Kinerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	Indeks RB	BB (76-78)	B 69,23	89,90
		Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)	B (64,05)	84,83
		Nilai evaluasi LPPD	3,40	2,17	63,82
		Indeks Inovasi Daerah	50	52,32	104,64
2	Meningkatnya Koordinasi Administratif dan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK (70-90)	CUKUP (65,54)	81,92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
	Pembinaan ASN	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Minimal	80-90	93,41	109,89
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	Nilai RB Setda	BB (76-78)		
		Nilai SAKIP Setda	A (81-90)	BB (71,00)	83,04

Dari 3 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran namun hanya 7 indikator yang memiliki nilai capaian disebabkan karena indikator ini (Indeks RB Setda) sudah tidak dilakukan pengukuran sejak tahun 2023. Jadi untuk capaian 7 indikator dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kriteria	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1 : Meningkatkan Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN			
1.	Sangat Tinggi		
2.	Tinggi	4	85,81
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah		
Sasaran 2 : Meningkatkan Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN			
1.	Sangat Tinggi	2	95,91
2.	Tinggi		
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah		
Sasaran 3 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Setda			

No.	Kriteria	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
1.	Sangat Tinggi		
2.	Tinggi	2	83,04%
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah		
Jumlah		8	88,25%

Berdasarkan persentase kategori pencapaian indikator sasaran tersebut di atas, secara umum realisasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dimana persentase capaian kerjanya sebesar 88,25% atau kriteria **“Tinggi”**.

### 3.1.2 CAPAIAN IKU

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing IKU diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Capaian IKU  
Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	Indeks RB	89,90	Tinggi	Bagian Organisasi
		Nilai SAKIP Daerah	84,83	Tinggi	Bagian Organisasi
		Nilai evaluasi LPPD	63,82	Sangat Rendah	Bagian Pemerintahan
		Indeks Inovasi Daerah	104,64	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Koordinasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang	81,92	Tinggi	Bagian Barang Dan Jasa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4		
	Administratif dan Pembinaan ASN	dan Jasa			
		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Minimal	109,89	Sangat Tinggi	Bagian Pemerintahan
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	Nilai RB Setda			Bagian Umum
		Nilai SAKIP Setda	83,04	Tinggi	Bagian Umum

### 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.5  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	3	4	5	6
<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan</b>				
1	Indeks RB	BB (76-78)	B (69,23)	89,9
2	Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)	B (64,05)	84,83
3	Nilai evaluasi LPPD	3,4	2,17	63,82
4	Indeks Inovasi Daerah	50	52,32	104,64
<b>Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN</b>				

5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK (70-90)	CUKUP (65,54)	81,92
6	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Minimal	80-90	93,41	109,89
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda</b>				
7	Nilai RB Setda	BB (76- 78)		
8	Nilai SAKIP Setda	A (81-90)	BB (71)	83,04

✓ **SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan**

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan” dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Indeks RB realisasi capaiannya 89,90%, Nilai SAKIP Daerah realisasi capaian kinerja yaitu 84,83%, Nilai Evaluasi LPPD realisasi capaian kinerja 63,82% dan Indeks Inovasi Daerah dengan realisasi capaian 104,64%, sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 yaitu 85,81% atau tercapai dengan kriteria **“Tinggi”**.

✓ **SASARAN 2 : Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN**

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 2 yaitu **“Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN”**, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa realisasi capaian kinerja yaitu 81,92% dan Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal realisasi capaian yaitu 102,99% sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu 92,46% atau tercapai dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**.

✓ **SASARAN 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda**

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu **“Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Setda”**, dengan 2 (dua) indikator Nilai RB Setda yang sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak dinilai dan Nilai SAKIP

Setda realisasi capaian kinerja yaitu 83,04% sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 3 tercapai dengan kriteria **“Tinggi”**.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan</b>				
1	Indeks RB	73,19	93,55	89,9
2	Nilai SAKIP Daerah	90,53	91,5	84,83
3	Nilai evaluasi LPPD	75,94	49,09	63,82
4	Indeks Inovasi Daerah	141,33	126,71	104,64
<b>Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN</b>				
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	24,4	50,01	81,92
6	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	133,97	102,99	109,89
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda</b>				
7	Nilai RB Setda			
8	Nilai SAKIP Setda	100,83	100,86	83,04

✓ **SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan**

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari semua indikator:

4. Indikator 1 dan 2 mengalami fluktuasi dimana dari tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan sedangkan dari 2024 ke 2025 mengalami penurunan capaian.
5. Indikator 3 juga mengalami fluktuasi dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan sedangkan dari 2024 ke 2025 mengalami peningkatan capaian.
6. Sedangkan Indikator 4 dari tahun 2023 ke 2025 mengalami penurunan.

✓ **Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN**

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya yang dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan pada indikator Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 namun di tahun 2025 mengalami peningkatan.

✓ **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda**

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Nilai RB Setda tidak ada disebabkan karena tidak dilaksanakannya penilaian pada level perangkat Daerah karena berpusat ke penilaian level kabupaten dan realisasi capaian kinerja untuk Indikator Nilai SAKIP Setda mengalami fluktuasi dimana dari tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan sedangkan dari 2024 ke 2025 mengalami penurunan capaian.

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026.**

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah  
Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi 2025	Capaian (%)
<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan</b>				
1	Indeks RB	BB (79-80)	B (69,23)	87,08
2	Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)	B (64,05)	84,83

3	Nilai evaluasi LPPD	3,5	2,17	62
4	Indeks Inovasi Daerah	55	52,32	95,13
<b>Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN</b>				
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK	CUKUP	81,92
6	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	100	93,41	93,41
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda</b>				
7	Nilai RB			
8	Nilai SAKIP Setda	A (81-90)	BB (83,04)	97,12
<b>CAPAIAN</b>				<b>85,93</b>

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 adalah dimana realisasi hingga Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja **85,93%** dari 7 indikator yang dinilai.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional.**

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Target Akhir	2025	Target Nasional
<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan</b>				
1	Indeks RB	BB (79-80)	(69,23)	-
2	Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)	B (64,05)	-
3	Nilai evaluasi LPPD	3,5	2,17	-

4	Indeks Inovasi Daerah	55	52,32	-
<b>Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN</b>				
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK	CUKUP	-
6	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	100	93,41	-
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda</b>				
7	Nilai RB			
8	Nilai SAKIP Setda	A (81-90)	BB (71,00)	-

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional adalah dimana pada Sekretariat Daerah tidak memiliki target Nasional.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.**

❖ Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

✓ **Sasaran I Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan**

Peningkatan Realisasi ini disebabkan :

- 📌 Ketersediaan Data yang dibutuhkan dalam penginputan
- 📌 Ketepatan waktu dalam menyelesaikan penginputan data pada aplikasi
- 📌 Adanya peningkatan kinerja dari Tim yang sudah maksimal

Penyebab penurunan kinerja pada sasaran I yaitu :

- 📌 Masih ada Indeks atau nilai yang belum terbit sampai dengan laporan ini di buat sementara target capaian kinerja tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.
- 📌 Masih ada beberapa data yang dibutuhkan dari Perangkat daerah pengampu yang tidak sesuai dengan form aplikasi yang tersedia.

✓ **Sasaran 2. Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN**

Peningkatan Realisasi ini disebabkan :

- ✚ Ketersediaan Data yang dibutuhkan dalam penginputan
- ✚ Ketepatan waktu dalam menyelesaikan penginputan data pada aplikasi
- ✚ Adanya peningkatan kinerja dari Tim yang sudah maksimal

Penyebab penurunan kinerja pada sasaran I yaitu :

- ✚ Masih ada Indeks atau nilai yang belum terbit sampai dengan laporan ini di buat.
- ✚ Masih ada beberapa data yang dibutuhkan dari Perangkat daerah pengampu yang tidak sesuai dengan form aplikasi yang tersedia

✓ **Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda**

Peningkatan Realisasi ini disebabkan :

- Ketersediaan Data yang dibutuhkan dalam penginputan
- Ketepatan waktu dalam menyelesaikan penginputan data pada aplikasi
- Adanya peningkatan kinerja dari Tim yang sudah maksimal

Penyebab penurunan kinerja pada sasaran I yaitu :

- Pada indikator nilai SAKIP Setda mengalami capaian penurunan disebabkan karena adanya perubahan target capaian yang signifikan tetapi jika melihat perbandingan tahun sebelumnya hal ini merupakan peningkatan nilai yang dicapai oleh Sekretariat Daerah.

Adapun solusi yang telah dilakukan Sekretariat Daerah dalam peningkatan kinerja antara lain::

- ✚ Tetap memaksimalkan peningkatan kinerja dan kerja sama Tim Kerja dalam peningkatan SAKIP Setda
- ✚ Untuk perhitungan capaian dengan indicator yang belum terbit nilai atau

indeksnya, maka perhitungan capaian kinerja tahun ini tetap menggunakan indeks tahun sebelumnya

- ✚ Terkait data yang tidak sesuai dengan form pada aplikasi dengan memanggil langsung atau menghubungi langsung penanggung jawab masing-masing kegiatan pada perangkat daerah.
- ✚ Dukungan sumber daya telah dilakukan dengan ketersediaan anggaran.

#### f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

##### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan</b>				
1	Indeks RB	89,9	81,04	8,86
2	Nilai SAKIP Daerah	84,83	98,06	-13,23
3	Nilai evaluasi LPPD	63,82	99,74	-35,92
4	Indeks Inovasi Daerah	126,71	100	26,71
<b>Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN</b>				
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	81,92	53,9	28,02
6	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	102,99	99,74	3,25
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda</b>				
7	Nilai RB			
8	Nilai SAKIP Setda	83,04	98,94	-15,9

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) program Sebesar Rp.48.516.776.150,10 dengan realisasi sebesar Rp. 45.000.667.997,00 atau 92,75% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran sebesar 83,78%.

**g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada 8 indikator terdiri dari 3 Program dan 21 kegiatan serta 69 sub kegiatan. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 48.516.776.150,10 realisasi sebesar Rp. 45.000.667.997,00 atau 92,75% yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun Anggaran 2025**

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			ANGGARAN	% ANGGARAN	% FISIK
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp41.393.848.060,10</b>	<b>Rp38.618.312.668,00</b>	<b>93,29%</b>	<b>93,29%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp74.243.850,00</b>	<b>Rp73.968.120,00</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp25.469.110,00	Rp25.400.800,00	99,73%	99,73%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100,00%	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp10.999.670,00	Rp10.937.020,00	99,43%	99,43%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100,00%	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp10.999.670,00	Rp10.926.800,00	99,34%	99,34%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.775.400,00	Rp6.703.500,00	98,94%	98,94%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp12.817.883.322,47</b>	<b>Rp11.025.224.050,00</b>	<b>86,01%</b>	<b>86,01%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.472.706.922,47	Rp10.680.845.300,00	85,63%	85,63%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp12.690.070,00	Rp12.664.460,00	99,80%	99,80%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp265.501.970,00	Rp264.978.920,00	99,80%	99,80%
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp30.864.670,00	Rp30.746.220,00	99,62%	99,62%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	100,00%	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp16.339.600,00	Rp16.291.600,00	99,71%	99,71%
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp8.780.090,00	Rp8.697.550,00	99,06%	99,06%
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp146.543.690,00</b>	<b>Rp146.137.620,00</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp27.249.220,00	Rp27.238.120,00	99,96%	99,96%
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp31.275.580,00	Rp31.171.370,00	99,67%	99,67%
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp88.018.890,00	Rp87.728.130,00	99,67%	99,67%

<b>4</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp34.177.250,00</b>	<b>Rp34.053.840,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp34.177.250,00	Rp34.053.840,00	99,64%	99,64%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp177.566.300,00	Rp91.442.200,00	51,50%	51,50%
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp40.614.100,00	Rp37.407.500,00	92,10%	92,10%
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp59.452.200,00	Rp54.034.700,00	90,89%	90,89%
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp77.500.000,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp2.520.684.088,00</b>	<b>Rp2.434.208.062,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>96,57%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp73.737.300,00	Rp63.006.010,00	85,45%	85,45%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp185.288.388,00	Rp181.959.100,00	98,20%	98,20%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp73.273.400,00	Rp53.356.000,00	72,82%	72,82%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp1.881.835.000,00	Rp1.839.615.104,00	97,76%	97,76%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp305.550.000,00	Rp296.271.848,00	96,96%	96,96%
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.331.696.000,00	Rp2.239.526.400,00	96,05%	96,05%
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp418.099.000,00	Rp415.561.800,00	99,39%	99,39%
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.888.878.609,00	Rp1.862.531.601,00	98,61%	98,61%
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp4.283.989.772,00</b>	<b>Rp4.212.020.985,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,32%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp87.403.500,00	Rp82.682.500,00	94,60%	94,60%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp155.498.272,00	Rp137.987.044,00	88,74%	88,74%
<b>7</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>Rp155.498.272,00</b>	<b>Rp137.987.044,00</b>	<b>88,74%</b>	<b>88,74%</b>
1	Belanja Tagihan Air	Rp155.498.272,00	Rp137.987.044,00	88,74%	88,74%
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.357.088.000,00	Rp2.348.651.441,00	99,64%	99,64%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.684.000.000,00	Rp1.642.700.000,00	97,55%	97,55%
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp9.847.456.048,63</b>	<b>Rp9.495.705.158,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>96,43%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4.862.496.500,00	Rp4.798.052.954,00	98,67%	98,67%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp130.900.000,00	Rp127.279.000,00	97,23%	97,23%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp4.854.059.548,63	Rp4.570.373.204,00	94,16%	94,16%
<b>9</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Rp1.350.227.000,00</b>	<b>Rp1.160.247.568,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>85,93%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp850.000.000,00	Rp731.186.947,00	86,02%	86,02%
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp402.547.000,00	Rp402.431.921,00	99,97%	99,97%
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp97.680.000,00	Rp26.628.700,00	27,26%	27,26%
<b>10</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Rp4.636.963.500,00</b>	<b>Rp4.567.140.966,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>98,49%</b>
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp2.462.510.000,00	Rp2.448.000.448,00	99,41%	99,41%
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp1.421.270.500,00	Rp1.386.705.586,00	97,57%	97,57%
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp753.183.000,00	Rp732.434.932,00	97,25%	97,25%

<b>11</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Rp82.218.760,00</b>	<b>Rp78.513.660,00</b>	<b>95,49%</b>	<b>95,49%</b>
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp15.113.620,00	Rp14.820.300,00	98,06%	98,06%
2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp42.094.070,00	Rp41.449.160,00	98,47%	98,47%
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp14.010.900,00	Rp11.355.100,00	81,04%	81,04%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp11.000.170,00	Rp10.889.100,00	98,99%	98,99%
<b>12</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp783.220.870,00</b>	<b>Rp782.030.638,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>
1	Fasilitasi Keprotokolan	Rp625.159.170,00	Rp624.741.038,00	99,93%	99,93%
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp9.169.100,00	Rp9.148.000,00	99,77%	99,77%
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp148.892.600,00	Rp148.141.600,00	99,50%	99,50%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Rp5.654.943.620,00</b>	<b>Rp5.148.835.209,00</b>	<b>91,05%</b>	<b>91,05%</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Rp160.335.470,00</b>	<b>Rp159.351.180,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp79.883.100,00	Rp79.488.700,00	99,51%	99,51%
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp45.046.370,00	Rp44.531.480,00	98,86%	98,86%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp35.406.000,00	Rp35.331.000,00	99,79%	99,79%
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp5.158.331.990,00</b>	<b>Rp4.666.487.329,00</b>	<b>90,47%</b>	<b>90,47%</b>
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp5.157.027.190,00	Rp4.665.182.529,00	90,46%	90,46%
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp652.400,00	Rp652.400,00	100,00%	100,00%
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp652.400,00	Rp652.400,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Rp313.241.160,00</b>	<b>Rp300.022.700,00</b>	<b>95,78%</b>	<b>95,78%</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp88.397.100,00	Rp87.635.500,00	99,14%	99,14%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp185.512.800,00	Rp180.510.700,00	97,30%	97,30%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp39.331.260,00	Rp31.876.500,00	81,05%	81,05%
<b>4</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Rp23.035.000,00</b>	<b>Rp22.974.000,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp20.061.000,00	Rp20.025.000,00	99,82%	99,82%
2	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp176.934.500,00	Rp176.723.320,00	99,88%	99,88%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp41.465.580,00</b>	<b>Rp39.386.800,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>94,99%</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp13.685.600,00	Rp13.309.600,00	97,25%	97,25%
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp13.308.350,00	Rp12.452.100,00	93,57%	93,57%
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp14.471.630,00	Rp13.625.100,00	94,15%	94,15%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp500.288.000,00</b>	<b>Rp269.673.000,00</b>	<b>53,90%</b>	<b>53,90%</b>
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp74.474.000,00	Rp32.020.000,00	42,99%	42,99%
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp14.986.000,00	Rp11.631.200,00	77,61%	77,61%
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp410.828.000,00	Rp226.021.800,00	55,02%	55,02%
<b>7</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp24.358.030,00</b>	<b>Rp24.171.000,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,23%</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp6.017.340,00	Rp6.001.100,00	99,73%	99,73%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp9.024.370,00	Rp9.004.700,00	99,78%	99,78%
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp9.316.320,00	Rp9.165.200,00	98,38%	98,38%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp48.516.776.150,10</b>	<b>Rp45.000.667.997,00</b>	<b>92,75%</b>	<b>92,75%</b>

h. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain pada saat pengumpulan data-data baik target kinerja maupun realisasi kinerja yang telah dicapai dan alternatif solusi yang ditempuh yaitu :

- Membuat grup Whats App (WA)
- Menghubungi langsung ke masing-masing kepala Bagian.

**3.3. REALISASI ANGGARAN**

1. Realisasi Penerimaan Rp. 5.075.840.974,45 atau 155,44%
2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.45.000.667.997,00 atau 92,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp.41.393.848.060,00 yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 3.11  
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp43.936.393.150,10	Rp40.535.712.376,00	92,26%
	Belanja Pegawai	Rp13.305.006.922,47	Rp11.394.332.247,00	85,64%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.207.386.227,63	Rp28.117.380.129,00	96,27%
	Belanja Hibah	Rp1.424.000.000,00	Rp1.024.000.000,00	71,91%
2	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp4.580.383.000,00	Rp4.464.955.621,00	97,48%
		Rp 48.516.776.150,10	Rp 45.000.667.997,00	92,75%

Rincian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.11 di atas.

3. Pemanfaatan Anggaran
  - a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar terdiri dari :
    - 1) Belanja Operasi

Realisasi anggaran belanja operasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 40.535.712.376,000 atau 92,26% yang diarahkan untuk :

Belanja Pegawai	Rp. 11.394.332.247,00
Belanja Barang	Rp. 28.117.380.129,00
Belanja Hibah	Rp. 1.024.000.000,00

2) Belanja Modal Rp. 4.464.955.621,00

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.000.667.997,00 atau 92,75% dengan jumlah 3 program, 21 kegiatan dan 72 sub kegiatan.

#### a. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

➤ Penghargaan yang telah diterima

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar telah meraih penghargaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) sebagai program Inovasi Pemerintah daerah dalam mendorong Percepatan Akses Keuangan Daerah.

➤ Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar tahun 2025 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data primer maupun data pendukung pada saat pelaporan belum tersedia secara keseluruhan
- 2) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur
- 3) Belum terdistribusikannya tugas secara merata di setiap Bagian

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

- 1) Percepatan pengumpulan data
- 2) Peningkatan sumber daya aparatur dalam hal peningkatan kinerja.
- 3) Pembagian tugas yang merata

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. LKj ini menyajikan sejauh mana target kinerja dan program kegiatan dan sub kegiatan termasuk jumlah anggaran yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun sebelumnya dapat direalisasikan. Dari sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar, maka dapat ditarik simpulan untuk pencapaian kinerjanya sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	Indeks RB	BB (76-78)	B 69,23	89,90	Tinggi
		Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)	B (64,05)	84,83	Tinggi
		Nilai evaluasi LPPD	3,40	2,17	63,82	Sangat rendah
		Indeks Inovasi Daerah	50	52,32	104,64	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK (70-90)	CUKUP (65,54)	81,92	Tinggi
		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Minimal	80-90	93,41	109,89	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	Nilai RB Setda	BB (76-78)			
		Nilai SAKIP Setda	A (81-90)	BB (71,00)	83,04	Tinggi

- Pada sasaran I dengan jumlah indikator 4 dimana pencapaian target kinerja sasaran strategis masuk dalam kriteria **Tinggi**;
- Pada sasaran II dengan jumlah Indikator 2 dimana pencapaian target kinerja sasaran strategis masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**;

- Pada sasaran III dengan jumlah Indikator 2 dimana pencapaian target kinerja sasaran strategis masuk dalam kriteria **Tinggi**;

Capaian kinerja yang mencapai hasil yang diharapkan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Takalar. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dapat memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai realisasi yang diharapkan. Semoga hal ini kemudian menjadi motivasi tersendiri untuk bekerja lebih keras lagi agar capaiannya pada masa-masa yang akan datang bisa lebih baik. Terkait dengan indikator kinerja yang belum tercapai, maka strategi di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun berjalan untuk memantapkan tahapan realisasi kinerja;
2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala baik itu triwulan, semesteran dan tahunan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD secara berkala dan berkelanjutan;
4. Mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran dengan membuat program-program yang prioritas dan menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar ini dibuat sebagai penggambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, semua persoalan yang berhubungan dengan perencanaan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dapat diminimalisir dengan mengedepankan sikap profesional, terbuka, akuntabel, kerjasama dan dukungan dari semua pihak.



Sekretaris Daerah,

**Dr. MUHAMMAD HASBI, S.STP, M.AP, M.I.KOM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/b

NIP. 19810112 200011 1 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HASBI

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HASBI

Jabatan : Pj. BUPATI TAKALAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

~~PIHAK KEDUA~~

MUHAMMAD HASBI

Takalar, Januari 2025

~~PINAK PERTAMA~~

MUHAMMAD HASBI



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	T.1 : Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	BB (76-78)
	S.1.1 Meningkatkan Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)
		Nilai Evaluasi LPPD	3,40
		Indeks Inovasi Daerah	50
	S.1.2 Meningkatkan Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK
		Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	80-90
2	T.2 : Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	BB (76-78)
	S.2.1 Meningkatkan Tata Kelola Pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	BB (71-80)

## PROGRAM :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 4.539.657.450	DAU SG, DBH, PAD, DAU
2 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 301.718.000	DAU, DBH, PAD
3 Program Administrasi Umum	Rp 31.229.601.768	DAU, PAD
<b>Total</b>	<b>Rp 36.070.977.218</b>	

(Terbilang : Tiga puluh enam milyar tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas)

~~RIHA KEDUA~~

~~MUHAMMAD HASBI~~

Takalar, Januari 2025

~~RIHA PERTAMA~~

~~MUHAMMAD HASBI~~



# PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman Pattallassang, Takalar ☎ (0418) 21090  
Pos Elektronik takalarinspektorat@gmail.com

---

Takalar, 21 Maret 2025

Nomor : 008 /719/Itda-Tkl/III/2025  
Sifat : -  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Kab. Takalar  
Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

di  
Pattallassang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Takalar, dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Tugas nomor: 800.1.11/146/SETDA/II/2024. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Takalar Nomor 391 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP internal adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar; menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan,

pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	BOBOT
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	30%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%

Hasil Evaluasi AKIP internal dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Skor	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	> 60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	> 50 -60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 -50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Matriks Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Bappelitbangda telah melakukan pendampingan dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk memastikan keselarasan dokumen Perencanaan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yaitu pada dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga pencapaian kinerja lebih jelas dan konsisten.
- b. Bappelitbangda telah melakukan pendampingan dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk memastikan Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan menetapkan Indikator dan target Indikator pada Tujuan dan Sasaran Strategis sehingga perencanaan kinerja dapat menggambarkan tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja.
- c. Bappelitbangda telah melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan Rencana Aksi perangkat daerah yang menginformasikan capaian kinerja dan aktivitas penting atas Perjanjian Kinerja.
- d. Tim Akuntabilitas Kinerja Kabupaten telah menyampaikan kepada Perangkat Daerah dalam menyajikan dokumen perencanaan pada evaluasi AKIP harus lengkap dan telah diformalkan.
- e. Bappelitbangda telah melakukan pendampingan dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk memastikan formulasi indikator kinerja tepat agar data kinerja yang dihasilkan dapat lebih handal dan mencerminkan kinerja yang diharapkan.
- f. Perangkat daerah telah menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga penyajian data kinerja telah memadai.
- g. Perangkat daerah telah menyusun SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- h. Inspektorat telah mereviu Laporan Kinerja pada Pemerintah Daerah.
- i. Telah dilakukan monitoring untuk memastikan Pemerintah Kabupaten Takalar dan Perangkat Daerah menindaklanjuti catatan evaluasi tahun sebelumnya.
- j. Telah disusun mekanisme monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal untuk mendorong perbaikan dan peningkatan implementasi AKIP pada Perangkat Daerah.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar dan terhadap 37 Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 menunjukkan nilai **73,62** dengan predikat "**BB**" yang merupakan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten (Pusat) dan Perangkat Daerah di bawahnya (Unit) yang diuji petik (sampling) yaitu masing-masing sampling 3 unit kerja pada klaster utama, klaster pendukung dan klaster

tambahan. *Capaian predikat tersebut menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.*

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,25	22,15
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,78	21,93
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,35	11,43
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,73	18,11
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>70,70</b>	<b>73,62</b>
<b>PREDIKAT</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen Renstra dan Renja atau antara dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja (PK). Contoh pada Kecamatan Kepulauan Galesong Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Sanrobone, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
- b. Rencana Aksi belum menginformasikan capaian kinerja dan aktivitas penting atas Perjanjian Kinerja. Contoh pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Satpol PP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang belum diformalkan saat pengumpulan dokumen bahan evaluasi. Contoh pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Kecamatan Galesong Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pada sebagian perangkat daerah yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memuat definisi operasional dan atau informasi formulasi perhitungan serta sumber data sehingga beberapa indikator belum diyakini ketetapan pengukuran dan keandalan datanya. Contoh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, BKPSDM, Dinas Sosial dan PMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kesehatan

### 3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah dalam menyusun Laporan Kinerja belum sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Contoh pada Kecamatan Sanrobone, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - b. Laporan Kinerja yang disusun tidak didukung atas data capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja sebagai bentuk bahwa informasi capaian kinerja akuntabel dan dapat diandalkan. Contoh pada BKPSDM, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- ### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- a. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal unit kerja yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan implementasi AKIP pada Perangkat Daerah.

## 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan kembali keselarasan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah baik antara dokumen Renstra dan Renja atau antara dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja.
- 2) Memastikan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Aksi memuat informasi capaian kinerja dan aktivitas penting atas Perjanjian Kinerja.
- 3) Memastikan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah telah diformalkan dengan baik, minimal dokumen telah ditandatangani dan dibubuhi stempel organisasi.
- 4) Memastikan perangkat daerah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) memuat definisi operasional dan atau informasi formulasi perhitungan serta sumber data sehingga beberapa indikator belum diyakini ketetapan pengukuran dan keandalan datanya.
- 5) Memastikan perangkat daerah dalam menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
- 6) Memastikan Laporan Kinerja yang disusun oleh perangkat daerah telah didukung atas data capaian kinerja dan dilampirkan dalam laporan kinerja sebagai bentuk bahwa informasi capaian kinerja akuntabel dan dapat diandalkan.

- 7) Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan implementasi AKIP pada Perangkat Daerah

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP internal sebagai penerapan manajemen kinerja. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kita semua mengharapkan agar seluruh jajaran manajemen di lingkungan Perangkat Daerah memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur Daerah,

**Nur Ilham Malik, S.E., Ak.**

Pembina Tk. I

NIP. 19810917 200502 1 002

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar**  
**TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,25	22,15
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,78	21,93
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,35	11,43
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,73	18,11
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>70,70</b>	<b>73,62</b>
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Plt. Inspektur Daerah,



**Nur Ilham Malik, S.E., Ak.**

Pembina Tk. I

NIP. 19810917 200502 1 002

**KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL****INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

Nama Satuan Kerja yang di Reviu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Nama Kepala Satuan Kerja	Dr.MUHAMMAD HASBI,S.STP,M.A.P,M.I.Kom

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30,00		21,30		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	BB	4,26		
<b>Kriteria:</b>					Tidak ada catatan	Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Pedoman teknis perencanaan kinerja Dokumen RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Renstra 2023-2026, Renja 2025, Rencana Aksi, DPA, dan Perjanjian Kinerja.
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					
7	Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja					
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	6,39		
<b>Kriteria:</b>					Masih terdapat kriteria yang masih kurang, sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen antara lain: Dokumen PPT seperti pada paparan SAKIP, Dokumen Laporan Monev triwulan(formulir E.81).	Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Dokumen perencanaan telah diformalkan, telah dipublikasikan tepat waktu, dan telah memuat kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai, Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan ke dalam SKP
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.					
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.					
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.					
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).					
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.					
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).					
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).					
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					

1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	10,65		
<b>Kriteria:</b>					Tidak ada catatan	Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: DPA, PK, Rencana Aksi, Renstra, LKJ, Laporan Monev,SKP,Tindak lanjut LHE Sakip.
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.					
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.					
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .					
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.					
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.					
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.					
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
2	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30,00	BB	21,30		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,26		
<b>Kriteria:</b>					Tidak ada catatan	Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Terdapat SOP Pengumpulan data kinerja
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.					
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.					
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.					
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	6,39		
<b>Kriteria:</b>					Tidak ada catatan	Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.					
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	10,65		
<b>Kriteria:</b>					Masih terdapat kriteria yang masih kurang, sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen antara lain: Perkada tentang TPP.	Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.					
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.					
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.					
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.					
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.					
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					

<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>		<b>10,65</b>	
<b>3.a</b>	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>	<b>3,00</b>	<b>BB</b>	<b>2,13</b>	
<b>Kriteria:</b>					
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Tidak ada catatan  Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: laporan Kinerja telah disusun, direviu, dipublikasi dan disampaikan tepat waktu
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				
<b>3.b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</b>	<b>4,50</b>	<b>BB</b>	<b>3,20</b>	
<b>Kriteria:</b>					
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				Tidak ada catatan  Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: laporan Kinerja telah disusun, direviu, dipublikasi dan disampaikan tepat waktu
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.				
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				
<b>3.c</b>	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7,50</b>	<b>BB</b>	<b>5,33</b>	
<b>Kriteria:</b>					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Tidak ada catatan  Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Laporan Kinerja telah memuat dokumen pendukung data kinerja
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>		<b>17,75</b>	
<b>4.a</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>5,00</b>	<b>BB</b>	<b>3,55</b>	
<b>Kriteria:</b>					
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Tidak ada catatan  Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Telah terdapat Pedoman Teknis Evaluasi Internal, Laporan hasil evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah serta laporan hasil evaluasi AKIP Internal Pemerintah Daerah
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				

<b>4.b</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>7,50</b>	<b>BB</b>	<b>5,33</b>	
<b>Kriteria:</b>					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Tidak ada catatan		Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Laporan evaluasi internal OPD dan Pemda, Tim Evaluator telah memiliki sertifikat dalam melakukan evaluasi sebagai APIP, Evaluasi telah menggunakan aplikasi (e-SAKIP)	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				
<b>4.c</b>	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</b>	<b>12,50</b>	<b>BB</b>	<b>8,88</b>	
<b>Kriteria:</b>					
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	Tidak ada catatan		Daftar evidence yang sudah tersedia untuk memenuhi kriteria penilaian antara lain: Semua kriteria terpenuhi	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				
<b>TOTAL NILAI (PREDIKAT)</b>		<b>100</b>	<b>BB</b>	<b>71,00</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025**


NO.	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	CATATAN	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	Tidak ada catatan	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Masih terdapat kriteria yang masih kurang, sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen antara lain : Dokumen PPT seperti paparan SAKIP, Dokumen Laporan Monev Triwulan (Formulir E.81)	Telah dilakukan Asistensi Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2025 dan Asistensi dokumen SAKIP pada bagian Organisasi( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1phNLbGK5Q8WvGX_soLJ_G1amPGICQDSW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1phNLbGK5Q8WvGX_soLJ_G1amPGICQDSW?usp=drive_link</a> ), dan monev Renja Semesteran ( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v9Y5ae6yLgH7IPUW7D1enf4be10">https://drive.google.com/drive/folders/1v9Y5ae6yLgH7IPUW7D1enf4be10</a> )
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Tidak ada catatan	
2	PENGUKURAN KINERJA		
2.a	Pengukuran kinerja telah dilakukan	Tidak ada catatan	

2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Tidak ada kekurangan	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Masih terdapat kriteria yang masih kurang, sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen antara lain: Perkada tentang TPP	<a href="https://drive.google.com/file/d/1YONoIWmicBPnF5675aJYcYqGbQqrX10I/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1YONoIWmicBPnF5675aJYcYqGbQqrX10I/view?usp=sharing</a> (terlampir)
3	PELAPORAN KINERJA		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Tidak ada catatan	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Tidak ada catatan	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Tidak ada catatan	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	Tidak ada catatan	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Tidak ada catatan	

4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	Tidak ada catatan	
-----	---	-------------------	--



Takalar, 25 Januari 2026  
Sekretaris Daerah

  
Dr. M. AMMAD HASBI, M.AP, M.Ikom  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19780918 200604 1 012



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 100.2.1.7 – 2109 TAHUN 2025  
TENTANG

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA  
NASIONAL TAHUN 2024 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-158 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Secara Nasional tanggal 15 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2024 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
2. Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan kode wilayah.

- KETIGA : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 (satu) terdiri atas:
- a. Nama pemerintah provinsi berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi;
  - b. Nama pemerintah kabupaten berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) kabupaten; dan
  - c. Nama pemerintah kota, berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 92 (sembilan puluh dua) kota.
- KEEMPAT : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan kode wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 (dua) terdiri atas:
- a. Nama pemerintah provinsi berdasarkan Skor dan Status Kinerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi berdasarkan urutan kode wilayah;
  - b. Nama pemerintah kabupaten berdasarkan Skor dan Status Kinerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) kabupaten berdasarkan urutan kode wilayah; dan
  - c. Nama pemerintah kota, berdasarkan Skor dan Status Kinerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 92 (sembilan puluh dua) kota berdasarkan urutan kode wilayah.
- KELIMA : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri atas:
- a. 3 (tiga) pemerintah provinsi dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 34 (tiga puluh empat) provinsi;
  - b. 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) kabupaten; dan
  - c. 10 (sepuluh) pemerintah kota dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 92 (sembilan puluh dua) kota.

KEENAM : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 3 (tiga) pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten dan 10 (sepuluh) pemerintah kota dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diusulkan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETUJUH : Berdasarkan Skor dan Status Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tidak Dinilai, apabila:

- a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 April Tahun 2024 baik yang sudah maupun belum mendapatkan putusan pengadilan tetap (*inkracht*);
- b. Tidak menaati peraturan Perundang-Undangan;
- c. Tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah; dan
- d. Melakukan pelanggaran hukum pidana/perdata.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



Asmawa AP, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197410151993111003

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2025  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
11. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
TENTANG  
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL  
TAHUN 2024 BERDASARKAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

A. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL

1. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
33 (TIGA PULUH TIGA) PROVINSI

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1	Provinsi DKI Jakarta	3,6684	Tinggi
2	Provinsi Jawa Barat	3,6672	Tinggi
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,6645	Tinggi
4	Provinsi Kalimantan Timur	3,6128	Tinggi
5	Provinsi Jawa Timur	3,6124	Tinggi
6	Provinsi Jawa Tengah	3,6111	Tinggi
7	Provinsi Bali	3,4584	Tinggi
8	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4534	Tinggi
9	Provinsi Banten	3,4512	Tinggi
10	Provinsi Riau	3,2553	Sedang
11	Provinsi Sumatera Selatan	3,2405	Sedang
12	Provinsi Sulawesi Tengah	3,2349	Sedang
13	Provinsi Gorontalo	3,2127	Sedang
14	Provinsi Lampung	3,0530	Sedang
15	Provinsi Jambi	2,9788	Sedang
16	Provinsi Sumatera Barat	2,9585	Sedang
17	Provinsi Kepulauan Riau	2,8773	Sedang
18	Provinsi Kalimantan Tengah	2,8758	Sedang
19	Provinsi Aceh	2,8734	Sedang
20	Provinsi Kalimantan Barat	2,8565	Sedang
21	Provinsi Sumatera Utara	2,8301	Sedang
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,8263	Sedang
23	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,8193	Sedang
24	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,6940	Sedang
25	Provinsi Kalimantan Utara	2,6784	Sedang
26	Provinsi Sulawesi Selatan	2,6601	Sedang
27	Provinsi Maluku	2,4827	Rendah
28	Provinsi Papua	2,4295	Rendah
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,3002	Rendah
30	Provinsi Sulawesi Utara	2,0202	Rendah
31	Provinsi Papua Barat	2,0063	Rendah
32	Provinsi Maluku Utara	1,5041	Sangat Rendah
33	Provinsi Sulawesi Barat	1,3978	Sangat Rendah

2. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 395 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA) KABUPATEN

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1	Kabupaten Bangli	3,7566	Tinggi
2	Kabupaten Klaten	3,7508	Tinggi
3	Kabupaten Sragen	3,7366	Tinggi
4	Kabupaten Banyuwangi	3,7147	Tinggi
5	Kabupaten Banjar	3,7047	Tinggi
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,7000	Tinggi
7	Kabupaten Tulungagung	3,6972	Tinggi
8	Kabupaten Wonogiri	3,6568	Tinggi
9	Kabupaten Wonosobo	3,6562	Tinggi
10	Kabupaten Pasaman	3,6474	Tinggi
11	Kabupaten Sumedang	3,6466	Tinggi
12	Kabupaten Trenggalek	3,6385	Tinggi
13	Kabupaten Bojonegoro	3,6366	Tinggi
14	Kabupaten Barito Selatan	3,6358	Tinggi
15	Kabupaten Ciamis	3,6326	Tinggi
16	Kabupaten Bulukumba	3,6254	Tinggi
17	Kabupaten Malang	3,6237	Tinggi
18	Kabupaten Sinjai	3,6118	Tinggi
19	Kabupaten Bintan	3,6009	Tinggi
20	Kabupaten Bekasi	3,5965	Tinggi
21	Kabupaten Karanganyar	3,5954	Tinggi
22	Kabupaten Banyumas	3,5905	Tinggi
23	Kabupaten Grobogan	3,5889	Tinggi
24	Kabupaten Agam	3,5771	Tinggi
25	Kabupaten Klungkung	3,5765	Tinggi
26	Kabupaten Pandeglang	3,5449	Tinggi
27	Kabupaten Kudus	3,5361	Tinggi
28	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3,5353	Tinggi
29	Kabupaten Garut	3,5136	Tinggi
30	Kabupaten Kebumen	3,5065	Tinggi
31	Kabupaten Indramayu	3,5058	Tinggi
32	Kabupaten Subang	3,4798	Tinggi
33	Kabupaten Jombang	3,4666	Tinggi
34	Kabupaten Jepara	3,4620	Tinggi
35	Kabupaten Berau	3,4608	Tinggi
36	Kabupaten Bone	3,4549	Tinggi
37	Kabupaten Lombok Tengah	3,4547	Tinggi
38	Kabupaten Magetan	3,4434	Tinggi
39	Kabupaten Bandung	3,4382	Tinggi
40	Kabupaten Tasikmalaya	3,4310	Tinggi
41	Kabupaten Bantul	3,4254	Tinggi
42	Kabupaten Sumbawa	3,4172	Tinggi
43	Kabupaten Gresik	3,4093	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
44	Kabupaten Boyolali	3,4069	Sedang
45	Kabupaten Konawe	3,4063	Sedang
46	Kabupaten Demak	3,4060	Sedang
47	Kabupaten Sukabumi	3,3960	Sedang
48	Kabupaten Poso	3,3946	Sedang
49	Kabupaten Wajo	3,3938	Sedang
50	Kabupaten Purwakarta	3,3933	Sedang
51	Kabupaten Banyuasin	3,3918	Sedang
52	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,3907	Sedang
53	Kabupaten Magelang	3,3903	Sedang
54	Kabupaten Rembang	3,3838	Sedang
55	Kabupaten Sukoharjo	3,3816	Sedang
56	Kabupaten Kuningan	3,3782	Sedang
57	Kabupaten Serang	3,3739	Sedang
58	Kabupaten Pati	3,3718	Sedang
59	Kabupaten Polewali Mandar	3,3584	Sedang
60	Kabupaten Balangan	3,3544	Sedang
61	Kabupaten Banjarnegara	3,3385	Sedang
62	Kabupaten Purworejo	3,3346	Sedang
63	Kabupaten Tanah Bumbu	3,3339	Sedang
64	Kabupaten Bantaeng	3,3324	Sedang
65	Kabupaten Kulon Progo	3,3246	Sedang
66	Kabupaten Kendal	3,3227	Sedang
67	Kabupaten Barito Kuala	3,3212	Sedang
68	Kabupaten Tabalong	3,3161	Sedang
69	Kabupaten Semarang	3,3141	Sedang
70	Kabupaten Blora	3,3139	Sedang
71	Kabupaten Situbondo	3,3111	Sedang
72	Kabupaten Sleman	3,3106	Sedang
73	Kabupaten Purbalingga	3,3075	Sedang
74	Kabupaten Tapin	3,3026	Sedang
75	Kabupaten Tanah Datar	3,2996	Sedang
76	Kabupaten Asahan	3,2983	Sedang
77	Kabupaten Temanggung	3,2983	Sedang
78	Kabupaten Mojokerto	3,2966	Sedang
79	Kabupaten Tanggamus	3,2945	Sedang
80	Kabupaten Badung	3,2944	Sedang
81	Kabupaten Bangka barat	3,2863	Sedang
82	Kabupaten Maros	3,2836	Sedang
83	Kabupaten Batubara	3,2823	Sedang
84	Kabupaten Bondowoso	3,2812	Sedang
85	Kabupaten Pringsewu	3,2812	Sedang
86	Kabupaten Sigi	3,2793	Sedang
87	Kabupaten Bone Bolango	3,2773	Sedang
88	Kabupaten Kediri	3,2756	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
89	Kabupaten Pamekasan	3,2726	Sedang
90	Kabupaten Lampung Tengah	3,2683	Sedang
91	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,2678	Sedang
92	Kabupaten Tabanan	3,2653	Sedang
93	Kabupaten Buleleng	3,2644	Sedang
94	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,2568	Sedang
95	Kabupaten Pematang	3,2535	Sedang
96	Kabupaten Serdang Bedagai	3,2444	Sedang
97	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,2441	Sedang
98	Kabupaten Luwu Utara	3,2437	Sedang
99	Kabupaten Tangerang	3,2397	Sedang
100	Kabupaten Bangka Selatan	3,2397	Sedang
101	Kabupaten Sumbawa Barat	3,2349	Sedang
102	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,2317	Sedang
103	Kabupaten Blitar	3,2285	Sedang
104	Kabupaten Cirebon	3,2088	Sedang
105	Kabupaten Bangka Tengah	3,2082	Sedang
106	Kabupaten Bangkalan	3,2056	Sedang
107	Kabupaten Karangasem	3,2052	Sedang
108	Kabupaten Cilacap	3,2017	Sedang
109	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,1983	Sedang
110	Kabupaten Pinrang	3,1957	Sedang
111	Kabupaten Probolinggo	3,1916	Sedang
112	Kabupaten Solok	3,1896	Sedang
113	Kabupaten Bogor	3,1841	Sedang
114	Kabupaten Kolaka	3,1799	Sedang
115	Kabupaten Mamuju	3,1697	Sedang
116	Kabupaten Gianyar	3,1689	Sedang
117	Kabupaten Belitung	3,1670	Sedang
118	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,1669	Sedang
119	Kabupaten Ponorogo	3,1595	Sedang
120	Kabupaten Tojo Una-Una	3,1572	Sedang
121	Kabupaten Gorontalo	3,1548	Sedang
122	Kabupaten Lombok Utara	3,1543	Sedang
123	Kabupaten Lamongan	3,1534	Sedang
124	Kabupaten Padang Pariaman	3,1529	Sedang
125	Kabupaten Kolaka Utara	3,1487	Sedang
126	Kabupaten Parigi Moutong	3,1487	Sedang
127	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3,1478	Sedang
128	Kabupaten Karawang	3,1464	Sedang
129	Kabupaten Lumajang	3,1458	Sedang
130	Kabupaten Batanghari	3,1413	Sedang
131	Kabupaten Lamandau	3,1412	Sedang
132	Kabupaten Belitung Timur	3,1406	Sedang
133	Kabupaten Morowali	3,1330	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
134	Kabupaten Majene	3,1324	Sedang
135	Kabupaten Karimun	3,1324	Sedang
136	Kabupaten Brebes	3,1316	Sedang
137	Kabupaten Tanah Laut	3,1298	Sedang
138	Kabupaten Sijunjung	3,1271	Sedang
139	Kabupaten Enrekang	3,1239	Sedang
140	Kabupaten Kutai Timur	3,1187	Sedang
141	Kabupaten Pasuruan	3,1185	Sedang
142	Kabupaten Bima	3,1153	Sedang
143	Kabupaten Bangka	3,1096	Sedang
144	Kabupaten Morowali Utara	3,0953	Sedang
145	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,0921	Sedang
146	Kabupaten Musi Rawas	3,0907	Sedang
147	Kabupaten Tapanuli Utara	3,0859	Sedang
148	Kabupaten Madiun	3,0817	Sedang
149	Kabupaten Lombok Timur	3,0736	Sedang
150	Kabupaten Gunungkidul	3,0722	Sedang
151	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,0683	Sedang
152	Kabupaten Bungo	3,0586	Sedang
153	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,0575	Sedang
154	Kabupaten Bolaang Mongondow	3,0561	Sedang
155	Kabupaten Tulang Bawang	3,0546	Sedang
156	Kabupaten Pekalongan	3,0541	Sedang
157	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3,0511	Sedang
158	Kabupaten Lombok Barat	3,0491	Sedang
159	Kabupaten Pangandaran	3,0442	Sedang
160	Kabupaten Luwu Timur	3,0420	Sedang
161	Kabupaten Batang	3,0400	Sedang
162	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,0285	Sedang
163	Kabupaten Majalengka	3,0224	Sedang
164	Kabupaten Musi Banyuasin	3,0191	Sedang
165	Kabupaten Bengkalis	3,0183	Sedang
166	Kabupaten Boalemo	3,0165	Sedang
167	Kabupaten Malinau	3,0118	Sedang
168	Kabupaten Langkat	3,0093	Sedang
169	Kabupaten Kutai Barat	2,9996	Sedang
170	Kabupaten Sumenep	2,9979	Sedang
171	Kabupaten Sampang	2,9904	Sedang
172	Kabupaten Minahasa Utara	2,9879	Sedang
173	Kabupaten Tana Tidung	2,9865	Sedang
174	Kabupaten Halmahera Selatan	2,9806	Sedang
175	Kabupaten Maluku Tengah	2,9771	Sedang
176	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2,9762	Sedang
177	Kabupaten Gunung Mas	2,9720	Sedang
178	Kabupaten Solok Selatan	2,9718	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
179	Kabupaten Lampung Timur	2,9718	Sedang
180	Kabupaten Pasangkayu	2,9688	Sedang
181	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,9653	Sedang
182	Kabupaten Merangin	2,9603	Sedang
183	Kabupaten Lampung Barat	2,9601	Sedang
184	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2,9595	Sedang
185	Kabupaten Lembata	2,9555	Sedang
186	Kabupaten Bengkulu Utara	2,9553	Sedang
187	Kabupaten Lingga	2,9500	Sedang
188	Kabupaten Kepulauan Selayar	2,9500	Sedang
189	Kabupaten Toba	2,9498	Sedang
190	Kabupaten Nunukan	2,9427	Sedang
191	Kabupaten Gorontalo Utara	2,9385	Sedang
192	Kabupaten Bulungan	2,9308	Sedang
193	Kabupaten Muara Enim	2,9302	Sedang
194	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,9275	Sedang
195	Kabupaten Mukomuko	2,9261	Sedang
196	Kabupaten Kepahiang	2,9228	Sedang
197	Kabupaten Wakatobi	2,9201	Sedang
198	Kabupaten Buton Selatan	2,9152	Sedang
199	Kabupaten Mesuji	2,9089	Sedang
200	Kabupaten Natuna	2,9044	Sedang
201	Kabupaten Sukamara	2,9011	Sedang
202	Kabupaten Donggala	2,8993	Sedang
203	Kabupaten Siak	2,8944	Sedang
204	Kabupaten Tebo	2,8931	Sedang
205	Kabupaten Jember	2,8880	Sedang
206	Kabupaten Kubu Raya	2,8861	Sedang
207	Kabupaten Mempawah	2,8832	Sedang
208	Kabupaten Seruyan	2,8784	Sedang
209	Kabupaten Ogan Ilir	2,8784	Sedang
210	Kabupaten Tuban	2,8746	Sedang
211	Kabupaten Humbang Hasundutan	2,8725	Sedang
212	Kabupaten Tegal	2,8567	Sedang
213	Kabupaten Manggarai Timur	2,8504	Sedang
214	Kabupaten Sarolangun	2,8485	Sedang
215	Kabupaten Aceh Besar	2,8399	Sedang
216	Kabupaten Soppeng	2,8357	Sedang
217	Kabupaten Buton Tengah	2,8320	Sedang
218	Kabupaten Aceh Tamiang	2,8314	Sedang
219	Kabupaten Nias	2,8295	Sedang
220	Kabupaten Lahat	2,8284	Sedang
221	Kabupaten Rejang Lebong	2,8247	Sedang
222	Kabupaten Sambas	2,8233	Sedang
223	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2,8212	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
224	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2,8202	Sedang
225	Kabupaten Lampung Selatan	2,8194	Sedang
226	Kabupaten Luwu	2,8144	Sedang
227	Kabupaten Kapuas Hulu	2,8143	Sedang
228	Kabupaten Kampar	2,8135	Sedang
229	Kabupaten Katingan	2,8134	Sedang
230	Kabupaten Manggarai	2,8113	Sedang
231	Kabupaten Lebak	2,8030	Sedang
232	Kabupaten Way Kanan	2,8022	Sedang
233	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,8001	Sedang
234	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,7982	Sedang
235	Kabupaten Pesisir Barat	2,7893	Sedang
236	Kabupaten Pulang Pisau	2,7864	Sedang
237	Kabupaten Paser	2,7858	Sedang
238	Kabupaten Dompu	2,7795	Sedang
239	Kabupaten Rokan Hulu	2,7712	Sedang
240	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2,7650	Sedang
241	Kabupaten Pakpak Bharat	2,7436	Sedang
242	Kabupaten Kotawaringin Timur	2,7402	Sedang
243	Kabupaten Kotabaru	2,7390	Sedang
244	Kabupaten Barru	2,7379	Sedang
245	Kabupaten Lebong	2,7365	Sedang
246	Kabupaten Toraja Utara	2,7316	Sedang
247	Kabupaten Minahasa Selatan	2,7316	Sedang
248	Kabupaten Bireuen	2,7228	Sedang
249	Kabupaten Jembrana	2,7188	Sedang
250	Kabupaten Pulau Morotai	2,7182	Sedang
251	Kabupaten Kapuas	2,7124	Sedang
252	Kabupaten Dharmasraya	2,7029	Sedang
253	Kabupaten Buol	2,6985	Sedang
254	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,6916	Sedang
255	Kabupaten Kuantan Singingi	2,6770	Sedang
256	Kabupaten Empat Lawang	2,6704	Sedang
257	Kabupaten Tolikara	2,6695	Sedang
258	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2,6666	Sedang
259	Kabupaten Ketapang	2,6661	Sedang
260	Kabupaten Aceh Barat	2,6654	Sedang
261	Kabupaten Aceh Selatan	2,6642	Sedang
262	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,6515	Sedang
263	Kabupaten Sintang	2,6464	Sedang
264	Kabupaten Ngawi	2,6459	Sedang
265	Kabupaten Lampung Utara	2,6451	Sedang
266	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2,6446	Sedang
267	Kabupaten Maluku Tenggara	2,6443	Sedang
268	Kabupaten Konawe Utara	2,6353	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
269	Kabupaten Timor Tengah Utara	2,6224	Sedang
270	Kabupaten Mappi	2,6107	Sedang
271	Kabupaten Sanggau	2,6047	Rendah
272	Kabupaten Pohuwato	2,6012	Rendah
273	Kabupaten Buton Utara	2,5906	Rendah
274	Kabupaten Halmahera Utara	2,5878	Rendah
275	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2,5830	Rendah
276	Kabupaten Sorong Selatan	2,5829	Rendah
277	Kabupaten Muaro Jambi	2,5797	Rendah
278	Kabupaten Toli-Toli	2,5774	Rendah
279	Kabupaten Kupang	2,5725	Rendah
280	Kabupaten Aceh Tenggara	2,5709	Rendah
281	Kabupaten Samosir	2,5682	Rendah
282	Kabupaten Fakfak	2,5568	Rendah
283	Kabupaten Manggarai Barat	2,5524	Rendah
284	Kabupaten Bener Meriah	2,5507	Rendah
285	Kabupaten Biak Numfor	2,5382	Rendah
286	Kabupaten Kayong Utara	2,5327	Rendah
287	Kabupaten Bengkayang	2,5230	Rendah
288	Kabupaten Aceh Jaya	2,5109	Rendah
289	Kabupaten Buru	2,5000	Rendah
290	Kabupaten Seluma	2,4961	Rendah
291	Kabupaten Nagekeo	2,4922	Rendah
292	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,4850	Rendah
293	Kabupaten Tambrau	2,4812	Rendah
294	Kabupaten Minahasa Tenggara	2,4702	Rendah
295	Kabupaten Ende	2,4668	Rendah
296	Kabupaten Cianjur	2,4660	Rendah
297	Kabupaten Barito Timur	2,4602	Rendah
298	Kabupaten Halmahera Tengah	2,4563	Rendah
299	Kabupaten Konawe Selatan	2,4484	Rendah
300	Kabupaten Ngada	2,4474	Rendah
301	Kabupaten Rokan Hilir	2,4417	Rendah
302	Kabupaten Merauke	2,4276	Rendah
303	Kabupaten Buton	2,4159	Rendah
304	Kabupaten Mimika	2,4133	Rendah
305	Kabupaten Landak	2,4127	Rendah
306	Kabupaten Musi Rawas Utara	2,4065	Rendah
307	Kabupaten Minahasa	2,4038	Rendah
308	Kabupaten Aceh Singkil	2,3844	Rendah
309	Kabupaten Melawi	2,3780	Rendah
310	Kabupaten Sumba Barat	2,3767	Rendah
311	Kabupaten Nias Barat	2,3762	Rendah
312	Kabupaten Simeulue	2,3735	Rendah
313	Kabupaten Flores Timur	2,3588	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
314	Kabupaten Seram Bagian Barat	2,3528	Rendah
315	Kabupaten Nias Utara	2,3478	Rendah
316	Kabupaten Sabu Raijua	2,3426	Rendah
317	Kabupaten Buru Selatan	2,3422	Rendah
318	Kabupaten Keerom	2,3288	Rendah
319	Kabupaten Kaur	2,3167	Rendah
320	Kabupaten Jayawijaya	2,3128	Rendah
321	Kabupaten Mandailing Natal	2,3095	Rendah
322	Kabupaten Aceh Timur	2,3033	Rendah
323	Kabupaten Halmahera Timur	2,2863	Rendah
324	Kabupaten Lanny Jaya	2,2668	Rendah
325	Kabupaten Sikka	2,2659	Rendah
326	Kabupaten Barito Utara	2,2485	Rendah
327	Kabupaten Mamuju Tengah	2,2411	Rendah
328	Kabupaten Murung Raya	2,2397	Rendah
329	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,2183	Rendah
330	Kabupaten Dairi	2,2107	Rendah
331	Kabupaten Boven Digoel	2,2061	Rendah
332	Kabupaten Kepulauan Yapen	2,2017	Rendah
333	Kabupaten Rote Ndao	2,1933	Rendah
334	Kabupaten Jayapura	2,1859	Rendah
335	Kabupaten Indragiri Hilir	2,1843	Rendah
336	Kabupaten Sumba Tengah	2,1694	Rendah
337	Kabupaten Takalar	2,1665	Rendah
338	Kabupaten Pegunungan Bintang	2,1193	Rendah
339	Kabupaten Alor	2,1127	Rendah
340	Kabupaten Asmat	2,1071	Rendah
341	Kabupaten Kepulauan Aru	2,0961	Rendah
342	Kabupaten Pesawaran	2,0717	Rendah
343	Kabupaten Aceh Barat Daya	2,0714	Rendah
344	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2,0660	Rendah
345	Kabupaten Teluk Wondama	2,0630	Rendah
346	Kabupaten Raja Ampat	2,0617	Rendah
347	Kabupaten Banggai	2,0609	Rendah
348	Kabupaten Indragiri Hulu	2,0608	Rendah
349	Kabupaten Nias Selatan	2,0476	Rendah
350	Kabupaten Yahukimo	2,0473	Rendah
351	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,0067	Rendah
352	Kabupaten Pacitan	1,9905	Rendah
353	Kabupaten Pidie	1,9845	Rendah
354	Kabupaten Deli Serdang	1,9843	Rendah
355	Kabupaten Sekadau	1,9774	Rendah
356	Kabupaten Puncak Jaya	1,9689	Rendah
357	Kabupaten Kerinci	1,9534	Rendah
358	Kabupaten Muna	1,9171	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
359	Kabupaten Mahakam Ulu	1,9149	Rendah
360	Kabupaten Gayo Lues	1,9099	Rendah
361	Kabupaten Pesisir Selatan	1,8650	Rendah
362	Kabupaten Belu	1,8243	Rendah
363	Kabupaten Intan Jaya	1,8150	Rendah
364	Kabupaten Maluku Barat Daya	1,7635	Sangat Rendah
365	Kabupaten Aceh Tengah	1,7182	Sangat Rendah
366	Kabupaten Manokwari Selatan	1,7076	Sangat Rendah
367	Kabupaten Karo	1,6907	Sangat Rendah
368	Kabupaten Kolaka Timur	1,6779	Sangat Rendah
369	Kabupaten Sarmi	1,6526	Sangat Rendah
370	Kabupaten Halmahera Barat	1,6175	Sangat Rendah
371	Kabupaten Sumba Timur	1,6077	Sangat Rendah
372	Kabupaten Nagan Raya	1,6071	Sangat Rendah
373	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,6001	Sangat Rendah
374	Kabupaten Maybrat	1,5965	Sangat Rendah
375	Kabupaten Aceh Utara	1,5855	Sangat Rendah
376	Kabupaten Tana Toraja	1,5729	Sangat Rendah
377	Kabupaten Manokwari	1,5524	Sangat Rendah
378	Kabupaten Simalungun	1,4495	Sangat Rendah
379	Kabupaten Kepulauan Sula	1,3849	Sangat Rendah
380	Kabupaten Malaka	1,3786	Sangat Rendah
381	Kabupaten Mamberamo Raya	1,2940	Sangat Rendah
382	Kabupaten Paniai	1,2729	Sangat Rendah
383	Kabupaten Pasaman Barat	1,1321	Sangat Rendah
384	Kabupaten Supiori	1,1144	Sangat Rendah
385	Kabupaten Teluk Bintuni	1,0691	Sangat Rendah
386	Kabupaten Padang Lawas	1,0063	Sangat Rendah
387	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,9830	Sangat Rendah
388	Kabupaten Muna Barat	0,7632	Sangat Rendah
389	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,5429	Sangat Rendah
390	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,5354	Sangat Rendah
391	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,3822	Sangat Rendah
392	Kabupaten Deiyai	0,1900	Sangat Rendah
393	Kabupaten Gowa	0,0861	Sangat Rendah
394	Kabupaten Kaimana	0,0383	Sangat Rendah
395	Kabupaten Waropen	0,0000	Sangat Rendah

3. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 90 (SEMBILAN PULUH) KOTA

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1.	Kota Surakarta	3,7916	Tinggi
2.	Kota Denpasar	3,7751	Tinggi
3.	Kota Balikpapan	3,7018	Tinggi

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
4.	Kota Tangerang	3,6983	Tinggi
5.	Kota Medan	3,6109	Tinggi
6.	Kota Batu	3,6057	Tinggi
7.	Kota Samarinda	3,5820	Tinggi
8.	Kota Makassar	3,5720	Tinggi
9.	Kota Tangerang Selatan	3,5480	Tinggi
10.	Kota Yogyakarta	3,5166	Tinggi
11.	Kota Salatiga	3,4936	Tinggi
12.	Kota Mojokerto	3,4575	Tinggi
13.	Kota Metro	3,4395	Tinggi
14.	Kota Palangka Raya	3,4329	Tinggi
15.	Kota Serang	3,4088	Sedang
16.	Kota Bandung	3,4018	Sedang
17.	Kota Palu	3,3938	Sedang
18.	Kota Banjar	3,3836	Sedang
19.	Kota Mataram	3,3741	Sedang
20.	Kota Blitar	3,3670	Sedang
21.	Kota Madiun	3,3619	Sedang
22.	Kota Pekalongan	3,3612	Sedang
23.	Kota Bekasi	3,3198	Sedang
24.	Kota Cimahi	3,3190	Sedang
25.	Kota Palembang	3,3186	Sedang
26.	Kota Malang	3,3060	Sedang
27.	Kota Semarang	3,2962	Sedang
28.	Kota Sukabumi	3,2780	Sedang
29.	Kota Padang	3,2739	Sedang
30.	Kota Banjarbaru	3,2612	Sedang
31.	Kota Bogor	3,2597	Sedang
32.	Kota Magelang	3,2540	Sedang
33.	Kota Tasikmalaya	3,2418	Sedang
34.	Kota Pangkal Pinang	3,2012	Sedang
35.	Kota Batam	3,1955	Sedang
36.	Kota Kediri	3,1870	Sedang
37.	Kota Gorontalo	3,1749	Sedang
38.	Kota Tarakan	3,1586	Sedang
39.	Kota Padang Panjang	3,1282	Sedang
40.	Kota Palopo	3,1159	Sedang
41.	Kota Surabaya	3,1120	Sedang
42.	Kota Pontianak	3,1046	Sedang
43.	Kota Singkawang	3,1030	Sedang
44.	Kota Tegal	3,0959	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
45.	Kota Parepare	3,0796	Sedang
46.	Kota Payakumbuh	3,0788	Sedang
47.	Kota Bontang	3,0659	Sedang
48.	Kota Manado	3,0623	Sedang
49.	Kota Kupang	3,0499	Sedang
50.	Kota Sawahlunto	3,0444	Sedang
51.	Kota Jambi	3,0226	Sedang
52.	Kota Tidore Kepulauan	2,9994	Sedang
53.	Kota Tebing Tinggi	2,9901	Sedang
54.	Kota Probolinggo	2,9769	Sedang
55.	Kota Kotamobagu	2,9736	Sedang
56.	Kota Bitung	2,9710	Sedang
57.	Kota Cilegon	2,9613	Sedang
58.	Kota Langsa	2,9388	Sedang
59.	Kota Sabang	2,9368	Sedang
60.	Kota Prabumulih	2,9286	Sedang
61.	Kota Dumai	2,9155	Sedang
62.	Kota Bukittinggi	2,9048	Sedang
63.	Kota Banjarmasin	2,8887	Sedang
64.	Kota Cirebon	2,8873	Sedang
65.	Kota Solok	2,7810	Sedang
66.	Kota Binjai	2,7697	Sedang
67.	Kota Tanjungbalai	2,7206	Sedang
68.	Kota Bengkulu	2,6859	Sedang
69.	Kota Lubuklinggau	2,6778	Sedang
70.	Kota Gunungsitoli	2,6691	Sedang
71.	Kota Bau-Bau	2,6561	Sedang
72.	Kota Sibolga	2,6483	Sedang
73.	Kota Tomohon	2,6144	Sedang
74.	Kota Jayapura	2,6092	Sedang
75.	Kota Depok	2,6038	Rendah
76.	Kota Kendari	2,5898	Rendah
77.	Kota Pagar Alam	2,5828	Rendah
78.	Kota Lhokseumawe	2,5623	Rendah
79.	Kota Tual	2,5171	Rendah
80.	Kota Sungaipenuh	2,5016	Rendah
81.	Kota Pematangsiantar	2,4672	Rendah
82.	Kota Ternate	2,4400	Rendah
83.	Kota Bima	2,4358	Rendah
84.	Kota Subulussalam	2,3819	Rendah
85.	Kota Bandar Lampung	2,2778	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
86.	Kota Pasuruan	2,2511	Rendah
87.	Kota Pariaman	2,1408	Rendah
88.	Kota Sorong	2,0661	Rendah
89.	Kota Padangsidempuan	1,6850	Sangat Rendah
90.	Kota Banda Aceh	1,6573	Sangat Rendah

B. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MENDAPAT NILAI.

- 1) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG KEPALA DAERAH TERSANGKUT KASUS HUKUM.

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Provinsi Bengkulu	Tidak dinilai	Tidak dinilai

- 2) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YANG KEPALA DAERAH TERSANGKUT KASUS HUKUM.

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Kabupaten Labuhanbatu	Tidak dinilai	Tidak dinilai
2	Kabupaten Bandung Barat	Tidak dinilai	Tidak dinilai
3	Kabupaten Sidoarjo	Tidak dinilai	Tidak dinilai
4	Kabupaten Bombana	Tidak dinilai	Tidak dinilai
5	Kabupaten Sorong	Tidak dinilai	Tidak dinilai

- 3) PEMERINTAH DAERAH KOTA YANG KEPALA DAERAH TERSANGKUT KASUS HUKUM.

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Kota Tanjungpinang	Tidak dinilai	Tidak dinilai
2	Kota Pekanbaru	Tidak dinilai	Tidak dinilai

- 4) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG TIDAK MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK MENYAMPAIKAN DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN).

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
	Nihil	Nihil	Nihil

- 5) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIDAK MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK MENYAMPAIKAN DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN).

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nihil	Nihil
2	Kabupaten Pulau Taliabu	Nihil	Nihil
3	Kabupaten Nduga	Nihil	Nihil
4	Kabupaten Yalimo	Nihil	Nihil
5	Kabupaten Dogiyai	Nihil	Nihil
6	Kabupaten Nabire	Nihil	Nihil
7	Kabupaten Puncak	Nihil	Nihil

- 6) PEMERINTAH DAERAH KOTA YANG TIDAK MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK MENYAMPAIKAN DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN).

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
	Nihil	Nihil	Nihil

- 7) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG TIDAK MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK MELAKUKAN REVIU TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN).

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
	Nihil	Nihil	Nihil

- 8) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YANG TIDAK MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK MELAKUKAN REVIU TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN).

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Kabupaten Pidie Jaya	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
2	Kabupaten Padang Lawas Utara	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
3	Kabupaten Tapanuli Tengah	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
4	Kabupaten Pelalawan	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
5	Kabupaten Nganjuk	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
6	Kabupaten Jeneponto	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
7	Kabupaten Banggai Laut	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
8	Kabupaten Mamasa	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai

- 9) PEMERINTAH DAERAH KOTA YANG TIDAK MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIDAK MELAKUKAN REVIU TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN).

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Kota Ambon	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai

C. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASING-MASING PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN URUTAN KODE WILAYAH

- 1) PROVINSI

Kode	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
11	Provinsi Aceh	2,8734	Sedang
12	Provinsi Sumatera Utara	2,8301	Sedang
13	Provinsi Sumatera Barat	2,9585	Sedang
14	Provinsi Riau	3,2553	Sedang
15	Provinsi Jambi	2,9788	Sedang
16	Provinsi Sumatera Selatan	3,2405	Sedang
17	Provinsi Bengkulu	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
18	Provinsi Lampung	3,0530	Sedang
19	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,6940	Sedang

Kode	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
21	Provinsi Kepulauan Riau	2,8773	Sedang
31	Provinsi DKI Jakarta	3,6684	Tinggi
32	Provinsi Jawa Barat	3,6672	Tinggi
33	Provinsi Jawa Tengah	3,6111	Tinggi
34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,6645	Tinggi
35	Provinsi Jawa Timur	3,6124	Tinggi
36	Provinsi Banten	3,4512	Tinggi
51	Provinsi Bali	3,4584	Tinggi
52	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,8263	Sedang
53	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,3002	Rendah
61	Provinsi Kalimantan Barat	2,8565	Sedang
62	Provinsi Kalimantan Tengah	2,8758	Sedang
63	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4534	Tinggi
64	Provinsi Kalimantan Timur	3,6128	Tinggi
65	Provinsi Kalimantan Utara	2,6784	Sedang
71	Provinsi Sulawesi Utara	2,0202	Rendah
72	Provinsi Sulawesi Tengah	3,2349	Sedang
73	Provinsi Sulawesi Selatan	2,6601	Sedang
74	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,8193	Sedang
75	Provinsi Gorontalo	3,2127	Sedang
76	Provinsi Sulawesi Barat	1,3978	Sangat Rendah
81	Provinsi Maluku	2,4827	Rendah
82	Provinsi Maluku Utara	1,5041	Sangat Rendah
91	Provinsi Papua	2,4295	Rendah
92	Provinsi Papua Barat	2,0063	Rendah

2) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
11.01	Kabupaten Aceh Selatan	2,6642	Sedang
11.02	Kabupaten Aceh Tenggara	2,5709	Rendah
11.03	Kabupaten Aceh Timur	2,3033	Rendah
11.04	Kabupaten Aceh Tengah	1,7182	Sangat Rendah
11.05	Kabupaten Aceh Barat	2,6654	Sedang
11.06	Kabupaten Aceh Besar	2,8399	Sedang
11.07	Kabupaten Pidie	1,9845	Rendah
11.08	Kabupaten Aceh Utara	1,5855	Sangat Rendah
11.09	Kabupaten Simeulue	2,3735	Rendah
11.10	Kabupaten Aceh Singkil	2,3844	Rendah
11.11	Kabupaten Bireuen	2,7228	Sedang
11.12	Kabupaten Aceh Barat Daya	2,0714	Rendah
11.13	Kabupaten Gayo Lues	1,9099	Rendah
11.14	Kabupaten Aceh Jaya	2,5109	Rendah
11.15	Kabupaten Nagan Raya	1,6071	Sangat Rendah
11.16	Kabupaten Aceh Tamiang	2,8314	Sedang

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
11.17	Kabupaten Bener Meriah	2,5507	Rendah
11.18	Kabupaten Pidie Jaya	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
11.71	Kota Banda Aceh	1,6573	Sangat Rendah
11.72	Kota Sabang	2,9368	Sedang
11.73	Kota Lhokseumawe	2,5623	Rendah
11.74	Kota Langsa	2,9388	Sedang
11.75	Kota Subulussalam	2,3819	Rendah

3) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
12.01	Kabupaten Tapanuli Tengah	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
12.02	Kabupaten Tapanuli Utara	3,0859	Sedang
12.03	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,7982	Sedang
12.04	Kabupaten Nias	2,8295	Sedang
12.05	Kabupaten Langkat	3,0093	Sedang
12.06	Kabupaten Karo	1,6907	Sangat Rendah
12.07	Kabupaten Deli Serdang	1,9843	Rendah
12.08	Kabupaten Simalungun	1,4495	Sangat Rendah
12.09	Kabupaten Asahan	3,2983	Sedang
12.10	Kabupaten Labuhanbatu	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
12.11	Kabupaten Dairi	2,2107	Rendah
12.12	Kabupaten Toba	2,9498	Sedang
12.13	Kabupaten Mandailing Natal	2,3095	Rendah
12.14	Kabupaten Nias Selatan	2,0476	Rendah
12.15	Kabupaten Pakpak Bharat	2,7436	Sedang
12.16	Kabupaten Humbang Hasundutan	2,8725	Sedang
12.17	Kabupaten Samosir	2,5682	Rendah
12.18	Kabupaten Serdang Bedagai	3,2444	Sedang
12.19	Kabupaten Batubara	3,2823	Sedang
12.20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
12.21	Kabupaten Padang Lawas	1,0063	Sangat Rendah
12.22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,4850	Rendah
12.23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3,0511	Sedang
12.24	Kabupaten Nias Utara	2,3478	Rendah
12.25	Kabupaten Nias Barat	2,3762	Rendah
12.71	Kota Medan	3,6109	Tinggi
12.72	Kota Pematangsiantar	2,4672	Rendah
12.73	Kota Sibolga	2,6483	Sedang
12.74	Kota Tanjungbalai	2,7206	Sedang
12.75	Kota Binjai	2,7697	Sedang
12.76	Kota Tebing Tinggi	2,9901	Sedang
12.77	Kota Padangsidempuan	1,6850	Sangat Rendah
12.78	Kota Gunungsitoli	2,6691	Sedang

4) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
13.01	Kabupaten Pesisir Selatan	1,8650	Rendah
13.02	Kabupaten Solok	3,1896	Sedang
13.03	Kabupaten Sijunjung	3,1271	Sedang
13.04	Kabupaten Tanah Datar	3,2996	Sedang
13.05	Kabupaten Padang Pariaman	3,1529	Sedang
13.06	Kabupaten Agam	3,5771	Tinggi
13.07	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,6001	Sangat Rendah
13.08	Kabupaten Pasaman	3,6474	Tinggi
13.09	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,9830	Sangat Rendah
13.10	Kabupaten Dharmasraya	2,7029	Sedang
13.11	Kabupaten Solok Selatan	2,9718	Sedang
13.12	Kabupaten Pasaman Barat	1,1321	Sangat Rendah
13.71	Kota Padang	3,2739	Sedang
13.72	Kota Solok	2,7810	Sedang
13.73	Kota Sawahlunto	3,0444	Sedang
13.74	Kota Padang Panjang	3,1282	Sedang
13.75	Kota Bukittinggi	2,9048	Sedang
13.76	Kota Payakumbuh	3,0788	Sedang
13.77	Kota Pariaman	2,1408	Rendah

5) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
14.01	Kabupaten Kampar	2,8135	Sedang
14.02	Kabupaten Indragiri Hulu	2,0608	Rendah
14.03	Kabupaten Bengkalis	3,0183	Sedang
14.04	Kabupaten Indragiri Hilir	2,1843	Rendah
14.05	Kabupaten Pelalawan	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
14.06	Kabupaten Rokan Hulu	2,7712	Sedang
14.07	Kabupaten Rokan Hilir	2,4417	Rendah
14.08	Kabupaten Siak	2,8944	Sedang
14.09	Kabupaten Kuantan Singingi	2,6770	Sedang
14.10	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,2183	Rendah
14.71	Kota Pekanbaru	Tidak dinilai	Tidak dinilai
14.72	Kota Dumai	2,9155	Sedang

6) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
15.01	Kabupaten Kerinci	1,9534	Rendah
15.02	Kabupaten Merangin	2,9603	Sedang
15.03	Kabupaten Sarolangun	2,8485	Sedang
15.04	Kabupaten Batanghari	3,1413	Sedang
15.05	Kabupaten Muaro Jambi	2,5797	Rendah

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
15.06	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2,6446	Sedang
15.07	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2,6666	Sedang
15.08	Kabupaten Bungo	3,0586	Sedang
15.09	Kabupaten Tebo	2,8931	Sedang
15.71	Kota Jambi	3,0226	Sedang
15.72	Kota Sungaipenuh	2,5016	Rendah

7) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
16.01	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2,9595	Sedang
16.02	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2,8212	Sedang
16.03	Kabupaten Muara Enim	2,9302	Sedang
16.04	Kabupaten Lahat	2,8284	Sedang
16.05	Kabupaten Musi Rawas	3,0907	Sedang
16.06	Kabupaten Musi Banyuasin	3,0191	Sedang
16.07	Kabupaten Banyuasin	3,3918	Sedang
16.08	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,6916	Sedang
16.09	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2,0660	Rendah
16.10	Kabupaten Ogan Ilir	2,8784	Sedang
16.11	Kabupaten Empat Lawang	2,6704	Sedang
16.12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2,8202	Sedang
16.13	Kabupaten Musi Rawas Utara	2,4065	Rendah
16.71	Kota Palembang	3,3186	Sedang
16.72	Kota Pagar Alam	2,5828	Rendah
16.73	Kota Lubuklinggau	2,6778	Sedang
16.74	Kota Prabumulih	2,9286	Sedang

8) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
17.01	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,1669	Sedang
17.02	Kabupaten Rejang Lebong	2,8247	Sedang
17.03	Kabupaten Bengkulu Utara	2,9553	Sedang
17.04	Kabupaten Kaur	2,3167	Rendah
17.05	Kabupaten Seluma	2,4961	Rendah
17.06	Kabupaten Mukomuko	2,9261	Sedang
17.07	Kabupaten Lebong	2,7365	Sedang
17.08	Kabupaten Kepahiang	2,9228	Sedang
17.09	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,0285	Sedang
17.71	Kota Bengkulu	2,6859	Sedang

9) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
18.01	Kabupaten Lampung Selatan	2,8194	Sedang
18.02	Kabupaten Lampung Tengah	3,2683	Sedang
18.03	Kabupaten Lampung Utara	2,6451	Sedang
18.04	Kabupaten Lampung Barat	2,9601	Sedang
18.05	Kabupaten Tulang Bawang	3,0546	Sedang
18.06	Kabupaten Tanggamus	3,2945	Sedang
18.07	Kabupaten Lampung Timur	2,9718	Sedang
18.08	Kabupaten Way Kanan	2,8022	Sedang
18.09	Kabupaten Pesawaran	2,0717	Rendah
18.10	Kabupaten Pringsewu	3,2812	Sedang
18.11	Kabupaten Mesuji	2,9089	Sedang
18.12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,3907	Sedang
18.13	Kabupaten Pesisir Barat	2,7893	Sedang
18.71	Kota Bandar Lampung	2,2778	Rendah
18.72	Kota Metro	3,4395	Tinggi

10) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
19.01	Kabupaten Bangka	3,1096	Sedang
19.02	Kabupaten Belitung	3,1670	Sedang
19.03	Kabupaten Bangka Selatan	3,2397	Sedang
19.04	Kabupaten Bangka Tengah	3,2082	Sedang
19.05	Kabupaten Bangka barat	3,2863	Sedang
19.06	Kabupaten Belitung Timur	3,1406	Sedang
19.71	Kota Pangkal Pinang	3,2012	Sedang

11) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
21.01	Kabupaten Bintan	3,6009	Tinggi
21.02	Kabupaten Karimun	3,1324	Sedang
21.03	Kabupaten Natuna	2,9044	Sedang
21.04	Kabupaten Lingga	2,9500	Sedang
21.05	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,2678	Sedang
21.71	Kota Batam	3,1955	Sedang
21.72	Kota Tanjungpinang	Tidak dinilai	Tidak dinilai

12) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA

13) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
32.01	Kabupaten Bogor	3,1841	Sedang
32.02	Kabupaten Sukabumi	3,3960	Sedang
32.03	Kabupaten Cianjur	2,4660	Rendah
32.04	Kabupaten Bandung	3,4382	Tinggi
32.05	Kabupaten Garut	3,5136	Tinggi
32.06	Kabupaten Tasikmalaya	3,4310	Tinggi
32.07	Kabupaten Ciamis	3,6326	Tinggi
32.08	Kabupaten Kuningan	3,3782	Sedang
32.09	Kabupaten Cirebon	3,2088	Sedang
32.10	Kabupaten Majalengka	3,0224	Sedang
32.11	Kabupaten Sumedang	3,6466	Tinggi
32.12	Kabupaten Indramayu	3,5058	Tinggi
32.13	Kabupaten Subang	3,4798	Tinggi
32.14	Kabupaten Purwakarta	3,3933	Sedang
32.15	Kabupaten Karawang	3,1464	Sedang
32.16	Kabupaten Bekasi	3,5965	Tinggi
32.17	Kabupaten Bandung Barat	Tidak dinilai	Tidak dinilai
32.18	Kabupaten Pangandaran	3,0442	Sedang
32.71	Kota Bogor	3,2597	Sedang
32.72	Kota Sukabumi	3,2780	Sedang
32.73	Kota Bandung	3,4018	Sedang
32.74	Kota Cirebon	2,8873	Sedang
32.75	Kota Bekasi	3,3198	Sedang
32.76	Kota Depok	2,6038	Rendah
32.77	Kota Cimahi	3,3190	Sedang
32.78	Kota Tasikmalaya	3,2418	Sedang
32.79	Kota Banjar	3,3836	Sedang

14) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
33.01	Kabupaten Cilacap	3,2017	Sedang
33.02	Kabupaten Banyumas	3,5905	Tinggi
33.03	Kabupaten Purbalingga	3,3075	Sedang
33.04	Kabupaten Banjarnegara	3,3385	Sedang
33.05	Kabupaten Kebumen	3,5065	Tinggi
33.06	Kabupaten Purworejo	3,3346	Sedang
33.07	Kabupaten Wonosobo	3,6562	Tinggi
33.08	Kabupaten Magelang	3,3903	Sedang
33.09	Kabupaten Boyolali	3,4069	Sedang
33.10	Kabupaten Klaten	3,7508	Tinggi
33.11	Kabupaten Sukoharjo	3,3816	Sedang
33.12	Kabupaten Wonogiri	3,6568	Tinggi
33.13	Kabupaten Karanganyar	3,5954	Tinggi

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
33.14	Kabupaten Sragen	3,7366	Tinggi
33.15	Kabupaten Grobogan	3,5889	Tinggi
33.16	Kabupaten Blora	3,3139	Sedang
33.17	Kabupaten Rembang	3,3838	Sedang
33.18	Kabupaten Pati	3,3718	Sedang
33.19	Kabupaten Kudus	3,5361	Tinggi
33.20	Kabupaten Jepara	3,4620	Tinggi
33.21	Kabupaten Demak	3,4060	Sedang
33.22	Kabupaten Semarang	3,3141	Sedang
33.23	Kabupaten Temanggung	3,2983	Sedang
33.24	Kabupaten Kendal	3,3227	Sedang
33.25	Kabupaten Batang	3,0400	Sedang
33.26	Kabupaten Pekalongan	3,0541	Sedang
33.27	Kabupaten Pemalang	3,2535	Sedang
33.28	Kabupaten Tegal	2,8567	Sedang
33.29	Kabupaten Brebes	3,1316	Sedang
33.71	Kota Magelang	3,2540	Sedang
33.72	Kota Surakarta	3,7916	Tinggi
33.73	Kota Salatiga	3,4936	Tinggi
33.74	Kota Semarang	3,2962	Sedang
33.75	Kota Pekalongan	3,3612	Sedang
33.76	Kota Tegal	3,0959	Sedang

15) KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
34.01	Kabupaten Kulon Progo	3,3246	Sedang
34.02	Kabupaten Bantul	3,4254	Tinggi
34.03	Kabupaten Gunungkidul	3,0722	Sedang
34.04	Kabupaten Sleman	3,3106	Sedang
34.71	Kota Yogyakarta	3,5166	Tinggi

16) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
35.01	Kabupaten Pacitan	1,9905	Rendah
35.02	Kabupaten Ponorogo	3,1595	Sedang
35.03	Kabupaten Trenggalek	3,6385	Tinggi
35.04	Kabupaten Tulungagung	3,6972	Tinggi
35.05	Kabupaten Blitar	3,2285	Sedang
35.06	Kabupaten Kediri	3,2756	Sedang
35.07	Kabupaten Malang	3,6237	Tinggi
35.08	Kabupaten Lumajang	3,1458	Sedang
35.09	Kabupaten Jember	2,8880	Sedang
35.10	Kabupaten Banyuwangi	3,7022	Tinggi

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
35.11	Kabupaten Bondowoso	3,2812	Sedang
35.12	Kabupaten Situbondo	3,3111	Sedang
35.13	Kabupaten Probolinggo	3,1916	Sedang
35.14	Kabupaten Pasuruan	3,1185	Sedang
35.15	Kabupaten Sidoarjo	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
35.16	Kabupaten Mojokerto	3,2966	Sedang
35.17	Kabupaten Jombang	3,4666	Tinggi
35.18	Kabupaten Nganjuk	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
35.19	Kabupaten Madiun	3,0817	Sedang
35.20	Kabupaten Magetan	3,4434	Tinggi
35.21	Kabupaten Ngawi	2,6459	Sedang
35.22	Kabupaten Bojonegoro	3,6366	Tinggi
35.23	Kabupaten Tuban	2,8746	Sedang
35.24	Kabupaten Lamongan	3,1534	Sedang
35.25	Kabupaten Gresik	3,4093	Sedang
35.26	Kabupaten Bangkalan	3,2056	Sedang
35.27	Kabupaten Sampang	2,9904	Sedang
35.28	Kabupaten Pamekasan	3,2726	Sedang
35.29	Kabupaten Sumenep	2,9979	Sedang
35.71	Kota Kediri	3,1870	Sedang
35.72	Kota Blitar	3,3670	Sedang
35.73	Kota Malang	3,3060	Sedang
35.74	Kota Probolinggo	2,9769	Sedang
35.75	Kota Pasuruan	2,2511	Rendah
35.76	Kota Mojokerto	3,4575	Tinggi
35.77	Kota Madiun	3,3619	Sedang
35.78	Kota Surabaya	3,1120	Sedang
35.79	Kota Batu	3,6057	Tinggi

17) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
36.01	Kabupaten Pandeglang	3,5449	Tinggi
36.02	Kabupaten Lebak	2,8030	Sedang
36.03	Kabupaten Tangerang	3,2397	Sedang
36.04	Kabupaten Serang	3,3739	Sedang
36.71	Kota Tangerang	3,6983	Tinggi
36.72	Kota Cilegon	2,9613	Sedang
36.73	Kota Serang	3,4088	Sedang
36.74	Kota Tangerang Selatan	3,5480	Tinggi

18) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
51.01	Kabupaten Jembrana	2,7188	Sedang
51.02	Kabupaten Tabanan	3,2653	Sedang
51.03	Kabupaten Badung	3,2944	Sedang
51.04	Kabupaten Gianyar	3,1689	Sedang
51.05	Kabupaten Klungkung	3,5765	Tinggi
51.06	Kabupaten Bangli	3,7566	Tinggi
51.07	Kabupaten Karangasem	3,2052	Sedang
51.08	Kabupaten Buleleng	3,2644	Sedang
51.71	Kota Denpasar	3,7751	Tinggi

19) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
52.01	Kabupaten Lombok Barat	3,0491	Sedang
52.02	Kabupaten Lombok Tengah	3,4547	Tinggi
52.03	Kabupaten Lombok Timur	3,0736	Sedang
52.04	Kabupaten Sumbawa	3,4172	Tinggi
52.05	Kabupaten Dompu	2,7795	Sedang
52.06	Kabupaten Bima	3,1153	Sedang
52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	3,2349	Sedang
52.08	Kabupaten Lombok Utara	3,1543	Sedang
52.71	Kota Mataram	3,3741	Sedang
52.72	Kota Bima	2,4358	Rendah

20) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
53.01	Kabupaten Kupang	2,5725	Rendah
53.02	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,0067	Rendah
53.03	Kabupaten Timor Tengah Utara	2,6224	Sedang
53.04	Kabupaten Belu	1,8243	Rendah
53.05	Kabupaten Alor	2,1127	Rendah
53.06	Kabupaten Flores Timur	2,3588	Rendah
53.07	Kabupaten Sikka	2,2659	Rendah
53.08	Kabupaten Ende	2,4668	Rendah
53.09	Kabupaten Ngada	2,4474	Rendah
53.10	Kabupaten Manggarai	2,8113	Sedang
53.11	Kabupaten Sumba Timur	1,6077	Sangat Rendah
53.12	Kabupaten Sumba Barat	2,3767	Rendah
53.13	Kabupaten Lembata	2,9555	Sedang
53.14	Kabupaten Rote Ndao	2,1933	Rendah
53.15	Kabupaten Manggarai Barat	2,5524	Rendah
53.16	Kabupaten Nagekeo	2,4922	Rendah
53.17	Kabupaten Sumba Tengah	2,1694	Rendah

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
53.18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nihil	Nihil
53.19	Kabupaten Manggarai Timur	2,8504	Sedang
53.20	Kabupaten Sabu Raijua	2,3426	Rendah
53.21	Kabupaten Malaka	1,3786	Sangat Rendah
53.71	Kota Kupang	3,0499	Sedang

21) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
61.01	Kabupaten Sambas	2,8233	Sedang
61.02	Kabupaten Mempawah	2,8832	Sedang
61.03	Kabupaten Sanggau	2,6047	Rendah
61.04	Kabupaten Ketapang	2,6661	Sedang
61.05	Kabupaten Sintang	2,6464	Sedang
61.06	Kabupaten Kapuas Hulu	2,8143	Sedang
61.07	Kabupaten Bengkayang	2,5230	Rendah
61.08	Kabupaten Landak	2,4127	Rendah
61.09	Kabupaten Sekadau	1,9774	Rendah
61.10	Kabupaten Melawi	2,3780	Rendah
61.11	Kabupaten Kayong Utara	2,5327	Rendah
61.12	Kabupaten Kubu Raya	2,8861	Sedang
61.71	Kota Pontianak	3,1046	Sedang
61.72	Kota Singkawang	3,1030	Sedang

22) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
62.01	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,2441	Sedang
62.02	Kabupaten Kotawaringin Timur	2,7402	Sedang
62.03	Kabupaten Kapuas	2,7124	Sedang
62.04	Kabupaten Barito Selatan	3,6358	Tinggi
62.05	Kabupaten Barito Utara	2,2485	Rendah
62.06	Kabupaten Katingan	2,8134	Sedang
62.07	Kabupaten Seruyan	2,8784	Sedang
62.08	Kabupaten Sukamara	2,9011	Sedang
62.09	Kabupaten Lamandau	3,1412	Sedang
62.10	Kabupaten Gunung Mas	2,9720	Sedang
62.11	Kabupaten Pulang Pisau	2,7864	Sedang
62.12	Kabupaten Murung Raya	2,2397	Rendah
62.13	Kabupaten Barito Timur	2,4602	Rendah
62.71	Kota Palangka Raya	3,4329	Tinggi

23) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
63.01	Kabupaten Tanah Laut	3,1298	Sedang
63.02	Kabupaten Kotabaru	2,7390	Sedang
63.03	Kabupaten Banjar	3,7047	Tinggi
63.04	Kabupaten Barito Kuala	3,3212	Sedang
63.05	Kabupaten Tapin	3,3026	Sedang
63.06	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,7050	Tinggi
63.07	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,9275	Sedang
63.08	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,2317	Sedang
63.09	Kabupaten Tabalong	3,3161	Sedang
63.10	Kabupaten Tanah Bumbu	3,3339	Sedang
63.11	Kabupaten Balangan	3,3544	Sedang
63.71	Kota Banjarmasin	2,8887	Sedang
63.72	Kota Banjarbaru	3,2612	Sedang

24) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
64.01	Kabupaten Paser	2,7858	Sedang
64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,2568	Sedang
64.03	Kabupaten Berau	3,4608	Tinggi
64.07	Kabupaten Kutai Barat	2,9996	Sedang
64.08	Kabupaten Kutai Timur	3,1187	Sedang
64.09	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,0575	Sedang
64.11	Kabupaten Mahakam Ulu	1,9149	Rendah
64.71	Kota Balikpapan	3,7018	Tinggi
64.72	Kota Samarinda	3,5820	Tinggi
64.74	Kota Bontang	3,0659	Sedang

25) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
65.01	Kabupaten Bulungan	2,9308	Sedang
65.02	Kabupaten Malinau	3,0118	Sedang
65.03	Kabupaten Nunukan	2,9427	Sedang
65.04	Kabupaten Tana Tidung	2,9865	Sedang
65.71	Kota Tarakan	3,1586	Sedang

26) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
71.01	Kabupaten Bolaang Mongondow	3,0561	Sedang
71.02	Kabupaten Minahasa	2,4038	Rendah
71.03	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2,9762	Sedang
71.04	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,0683	Sedang

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
71.05	Kabupaten Minahasa Selatan	2,7316	Sedang
71.06	Kabupaten Minahasa Utara	2,9879	Sedang
71.07	Kabupaten Minahasa Tenggara	2,4702	Rendah
71.08	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3,5353	Tinggi
71.09	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2,7650	Sedang
71.10	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,6515	Sedang
71.11	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,1983	Sedang
71.71	Kota Manado	3,0623	Sedang
71.72	Kota Bitung	2,9710	Sedang
71.73	Kota Tomohon	2,6144	Sedang
71.74	Kota Kotamobagu	2,9736	Sedang

27) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
72.01	Kabupaten Banggai	2,0609	Rendah
72.02	Kabupaten Poso	3,3946	Sedang
72.03	Kabupaten Donggala	2,8993	Sedang
72.04	Kabupaten Toli-Toli	2,5774	Rendah
72.05	Kabupaten Buol	2,6985	Sedang
72.06	Kabupaten Morowali	3,1330	Sedang
72.07	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,8001	Sedang
72.08	Kabupaten Parigi Moutong	3,1487	Sedang
72.09	Kabupaten Tojo Una-Una	3,1572	Sedang
72.10	Kabupaten Sigi	3,2793	Sedang
72.11	Kabupaten Banggai Laut	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
72.12	Kabupaten Morowali Utara	3,0953	Sedang
72.71	Kota Palu	3,3938	Sedang

28) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
73.01	Kabupaten Kepulauan Selayar	2,9500	Sedang
73.02	Kabupaten Bulukumba	3,6254	Tinggi
73.03	Kabupaten Bantaeng	3,3324	Sedang
73.04	Kabupaten Jeneponto	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
73.05	Kabupaten Takalar	2,1665	Rendah
73.06	Kabupaten Gowa	0,0861	Sangat Rendah
73.07	Kabupaten Sinjai	3,6118	Tinggi
73.08	Kabupaten Bone	3,4549	Tinggi
73.09	Kabupaten Maros	3,2836	Sedang
73.10	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3,1478	Sedang

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
73.11	Kabupaten Barru	2,7379	Sedang
73.12	Kabupaten Soppeng	2,8357	Sedang
73.13	Kabupaten Wajo	3,3938	Sedang
73.14	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,9653	Sedang
73.15	Kabupaten Pinrang	3,1957	Sedang
73.16	Kabupaten Enrekang	3,1239	Sedang
73.17	Kabupaten Luwu	2,8144	Sedang
73.18	Kabupaten Tana Toraja	1,5729	Sangat Rendah
73.22	Kabupaten Luwu Utara	3,2437	Sedang
73.24	Kabupaten Luwu Timur	3,0420	Sedang
73.26	Kabupaten Toraja Utara	2,7316	Sedang
73.71	Kota Makassar	3,5720	Tinggi
73.72	Kota Parepare	3,0796	Sedang
73.73	Kota Palopo	3,1159	Sedang

29) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
74.01	Kabupaten Kolaka	3,1799	Sedang
74.02	Kabupaten Konawe	3,4063	Sedang
74.03	Kabupaten Muna	1,9171	Rendah
74.04	Kabupaten Buton	2,4159	Rendah
74.05	Kabupaten Konawe Selatan	2,4484	Rendah
74.06	Kabupaten Bombana	Tidak dinilai	Tidak dinilai
74.07	Kabupaten Wakatobi	2,9201	Sedang
74.08	Kabupaten Kolaka Utara	3,1487	Sedang
74.09	Kabupaten Konawe Utara	2,6353	Sedang
74.10	Kabupaten Buton Utara	2,5906	Rendah
74.11	Kabupaten Kolaka Timur	1,6779	Sangat Rendah
74.12	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,0921	Sedang
74.13	Kabupaten Muna Barat	0,7632	Sangat Rendah
74.14	Kabupaten Buton Tengah	2,8320	Sedang
74.15	Kabupaten Buton Selatan	2,9152	Sedang
74.71	Kota Kendari	2,5898	Rendah
74.72	Kota Bau-Bau	2,6561	Sedang

30) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
75.01	Kabupaten Gorontalo	3,1548	Sedang
75.02	Kabupaten Boalemo	3,0165	Sedang
75.03	Kabupaten Bone Bolango	3,2773	Sedang
75.04	Kabupaten Pohuwato	2,6012	Rendah
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	2,9385	Sedang
75.71	Kota Gorontalo	3,1749	Sedang

31) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
76.01	Kabupaten Pasangkayu	2,9688	Sedang
76.02	Kabupaten Mamuju	3,1697	Sedang
76.03	Kabupaten Mamasa	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
76.04	Kabupaten Polewali Mandar	3,3584	Sedang
76.05	Kabupaten Majene	3,1324	Sedang
76.06	Kabupaten Mamuju Tengah	2,2411	Rendah

32) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
81.01	Kabupaten Maluku Tengah	2,9771	Sedang
81.02	Kabupaten Maluku Tenggara	2,6443	Sedang
81.03	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2,5830	Rendah
81.04	Kabupaten Buru	2,5000	Rendah
81.05	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,5354	Sangat Rendah
81.06	Kabupaten Seram Bagian Barat	2,3528	Rendah
81.07	Kabupaten Kepulauan Aru	2,0961	Rendah
81.08	Kabupaten Maluku Barat Daya	1,7635	Sangat Rendah
81.09	Kabupaten Buru Selatan	2,3422	Rendah
81.71	Kota Ambon	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
81.72	Kota Tual	2,5171	Rendah

33) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
82.01	Kabupaten Halmahera Barat	1,6175	Sangat Rendah
82.02	Kabupaten Halmahera Tengah	2,4563	Rendah
82.03	Kabupaten Halmahera Utara	2,5878	Rendah
82.04	Kabupaten Halmahera Selatan	2,9806	Sedang
82.05	Kabupaten Kepulauan Sula	1,3849	Sangat Rendah
82.06	Kabupaten Halmahera Timur	2,2863	Rendah
82.07	Kabupaten Pulau Morotai	2,7182	Sedang
82.08	Kabupaten Pulau Taliabu	Nihil	Nihil
82.71	Kota Ternate	2,4400	Rendah
82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,9994	Sedang

34) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
91.03	Kabupaten Jayapura	2,1859	Rendah
91.05	Kabupaten Kepulauan Yapen	2,2017	Rendah
91.06	Kabupaten Biak Numfor	2,5382	Rendah
91.10	Kabupaten Sarmi	1,6526	Sangat Rendah
91.11	Kabupaten Keerom	2,3288	Rendah

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
91.15	Kabupaten Waropen	0,0000	Sangat Rendah
91.19	Kabupaten Supiori	1,1144	Sangat Rendah
91.20	Kabupaten Mamberamo Raya	1,2940	Sangat Rendah
91.71	Kota Jayapura	2,6092	Rendah

35) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
92.02	Kabupaten Manokwari	1,5524	Sangat Rendah
92.03	Kabupaten Fakfak	2,5568	Rendah
92.06	Kabupaten Teluk Bintuni	1,0691	Sangat Rendah
92.07	Kabupaten Teluk Wondama	2,0630	Rendah
92.08	Kabupaten Kaimana	0,0383	Sangat Rendah
92.11	Kabupaten Manokwari Selatan	1,7076	Sangat Rendah
92.12	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,5429	Sangat Rendah

36) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
92.01	Kabupaten Sorong	Tidak dinilai	Tidak dinilai
92.04	Kabupaten Sorong Selatan	2,5829	Rendah
92.05	Kabupaten Raja Ampat	2,0617	Rendah
92.09	Kabupaten Tambrau	2,4812	Rendah
92.10	Kabupaten Maybrat	1,5965	Sangat Rendah
92.71	Kota Sorong	2,0661	Rendah

37) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
95.01	Kabupaten Jayawijaya	2,3128	Rendah
95.02	Kabupaten Pegunungan Bintang	2,1193	Rendah
95.03	Kabupaten Yahukimo	2,0473	Rendah
95.04	Kabupaten Tolikara	2,6695	Sedang
95.05	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,3822	Sangat Rendah
95.06	Kabupaten Yalimo	Nihil	Nihil
95.07	Kabupaten Lanny Jaya	2,2668	Rendah
95.08	Kabupaten Nduga	Nihil	Nihil

38) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA SELATAN

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
93.01	Kabupaten Merauke	2,4276	Rendah
93.02	Kabupaten Boven Digoel	2,2061	Rendah
93.03	Kabupaten Mappi	2,6107	Sedang
93.04	Kabupaten Asmat	2,1071	Rendah

39) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
94.01	Kabupaten Nabire	Nihil	Nihil
94.02	Kabupaten Puncak Jaya	1,9689	Rendah
94.03	Kabupaten Paniai	1,2729	Sangat Rendah
94.04	Kabupaten Mimika	2,4133	Rendah
94.05	Kabupaten Puncak	Nihil	Nihil
94.06	Kabupaten Dogiyai	Nihil	Nihil
94.07	Kabupaten Intan Jaya	1,8150	Rendah
94.08	Kabupaten Deiyai	0,1900	Sangat Rendah

MENTERI DALAM NEGERI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Asmawa P., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197410151993111003

Nomor : 1550/D.2.1/01/2026 21 Januari 2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Yth. **Kepala UKPBJ Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**  
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor: B/77/RB.04/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Permohonan Data Hasil Evaluasi Meso Tahun 2025, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Dengan diterbitkannya SE Kepala LKPP sebagaimana dimaksud pada nomor (1), maka Surat Sekretaris Utama LKPP nomor: 28006/SES/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025 dinyatakan sudah tidak berlaku.
3. Memperhatikan hal di atas, hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional. Hasil Penilaian ITKP 2025 sebagaimana terlampir bersama surat ini.
4. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 akan kami tayangkan pada menu Dashboard ITKP pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2025. Dashboard ITKP 2025 dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Transformasi,  
Pemantauan, dan Evaluasi  
Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Fadli Arif

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : D1pOb7  
Nomor Tiket : SK202601210033

4. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : D1pOb7  
**Nomor Tiket** : SK202601210033

## Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Final Tahun 2025

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	LEMBAGA	10.00	4.65	0.00	3.95	1.00	4.06	23.66	27.86	35.56	87.08	Baik
2	Badan Gizi Nasional	LEMBAGA	6.23	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	18.69	1.67	40.00	60.36	Cukup
3	Badan Informasi Geospasial	LEMBAGA	9.36	5.00	0.00	2.91	0.00	5.00	22.27	22.50	40.00	84.77	Baik
4	Badan Intelijen Negara	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	4.00	0.00	5.00	24.00	30.00	40.00	94.00	Sangat Baik
5	Badan Karantina Indonesia	LEMBAGA	5.35	0.00	0.00	0.00	1.00	1.79	8.13	12.00	35.56	55.69	Cukup
6	Badan Keamanan Laut	LEMBAGA	10.00	4.96	5.00	3.63	0.00	2.58	26.17	14.00	26.67	66.84	Cukup
7	Badan Kepegawaian Negara	LEMBAGA	10.00	4.76	3.03	3.96	1.00	4.76	27.51	24.44	40.00	91.95	Sangat Baik
8	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	LEMBAGA	6.46	2.70	0.00	0.00	1.00	4.05	14.21	16.91	40.00	71.12	Baik
9	Badan Narkotika Nasional	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	3.27	1.00	4.17	23.44	7.50	40.00	70.94	Baik
10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	3.86	1.00	1.75	21.61	10.91	0.00	32.52	Kurang
11	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	LEMBAGA	7.78	5.00	0.00	0.00	0.00	1.92	14.70	6.00	0.00	20.70	Kurang
12	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	LEMBAGA	6.96	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	15.96	0.00	0.00	15.96	Kurang
13	Badan Pangan Nasional	LEMBAGA	9.69	0.00	0.00	2.05	1.00	5.00	17.74	12.00	17.78	47.52	Kurang
14	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	LEMBAGA	10.00	5.00	2.61	3.90	1.00	4.39	26.90	18.00	35.56	80.46	Baik
15	Badan Pemeriksa Keuangan	LEMBAGA	9.91	4.21	0.00	3.60	1.00	3.55	22.27	18.00	35.56	75.83	Baik
16	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	LEMBAGA	9.82	5.00	3.85	3.70	1.00	4.74	28.11	20.15	40.00	88.26	Baik
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum	LEMBAGA	10.00	4.42	0.00	2.17	1.00	4.75	22.34	30.00	35.56	87.90	Baik
18	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	2.95	1.00	5.00	23.95	5.45	4.44	33.84	Kurang
19	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	LEMBAGA	10.00	5.00	5.00	4.00	1.00	4.52	29.52	30.00	40.00	99.52	Sangat Baik
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	LEMBAGA	10.00	5.00	2.65	0.00	1.00	4.66	23.31	Dikecualikan	Dikecualikan	77.70	Baik
21	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	LEMBAGA	7.41	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	22.23	Dikecualikan	Dikecualikan	74.10	Baik
22	Badan Pusat Statistik	LEMBAGA	10.00	5.00	4.08	3.85	1.00	4.95	28.88	25.63	35.56	90.07	Sangat Baik
23	Badan Riset dan Inovasi Nasional	LEMBAGA	10.00	5.00	0.00	3.92	1.00	4.76	24.68	25.26	40.00	89.94	Baik
24	Badan SAR Nasional/Badan Nasional Pencarian Pertolongan	LEMBAGA	7.41	5.00	0.00	0.00	1.00	4.40	17.81	6.75	22.22	46.78	Kurang
25	Badan Siber dan Sandi Negara	LEMBAGA	10.00	5.00	3.63	3.58	1.00	4.43	27.63	23.57	40.00	91.20	Sangat Baik
26	Badan Standardisasi Nasional	LEMBAGA	10.00	5.00	4.96	3.95	1.00	5.00	29.91	21.00	35.56	86.47	Baik
27	Kejaksaan Agung RI	LEMBAGA	8.42	4.94	4.95	0.00	1.00	3.47	22.78	30.00	35.56	88.34	Baik
28	Kementerian Agama	KEMENTERIAN	9.86	5.00	0.00	0.00	1.00	3.80	19.66	28.57	35.56	83.79	Baik
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	KEMENTERIAN	10.00	3.81	0.00	2.56	1.00	3.64	21.01	9.77	35.56	66.34	Cukup
30	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	KEMENTERIAN	10.00	5.00	3.46	3.73	1.00	4.81	28.00	30.00	40.00	98.00	Sangat Baik
31	Kementerian Dalam Negeri	KEMENTERIAN	10.00	5.00	2.67	3.62	1.00	4.67	26.96	28.13	40.00	95.09	Sangat Baik
32	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KEMENTERIAN	10.00	0.00	0.00	2.98	1.00	4.14	18.12	21.75	40.00	79.87	Baik
33	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	KEMENTERIAN	9.97	4.70	3.33	2.53	1.00	2.84	24.37	23.57	40.00	87.94	Baik
34	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	2.68	1.00	3.85	22.53	20.57	40.00	83.10	Baik
35	Kementerian Haji dan Umroh	KEMENTERIAN	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	Kurang
36	Kementerian Hak Asasi Manusia	KEMENTERIAN	10.00	5.00	5.00	3.98	1.00	4.89	29.87	30.00	40.00	99.87	Sangat Baik
37	Kementerian Hukum	KEMENTERIAN	10.00	5.00	5.00	3.98	1.00	4.89	29.87	30.00	40.00	99.87	Sangat Baik
38	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	5.00	3.98	1.00	4.89	29.87	30.00	40.00	99.87	Sangat Baik
39	Kementerian Investasi dan Hillirisasi	KEMENTERIAN	7.31	5.00	4.08	4.00	0.00	3.88	24.27	13.85	26.67	64.79	Cukup
40	Kementerian Kebudayaan	KEMENTERIAN	10.00	4.91	0.00	2.36	1.00	4.70	22.97	29.09	40.00	92.06	Sangat Baik
41	Kementerian Kehutanan	KEMENTERIAN	8.28	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	17.28	30.00	40.00	87.28	Baik
42	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	3.62	1.00	4.89	24.51	27.04	40.00	91.55	Sangat Baik
43	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	KEMENTERIAN	9.90	5.00	4.80	3.31	1.00	4.16	28.17	21.49	40.00	89.66	Baik
44	Kementerian Kesehatan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.97	19.97	17.71	40.00	77.68	Baik
45	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN	10.00	3.50	0.00	3.42	1.00	4.33	22.26	13.71	40.00	75.97	Baik
46	Kementerian Keuangan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	4.29	3.42	1.00	4.84	28.55	23.48	40.00	92.03	Sangat Baik
47	Kementerian Komunikasi dan Digital	KEMENTERIAN	10.00	3.43	0.00	2.54	1.00	4.62	21.59	29.09	35.56	86.24	Baik
48	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	KEMENTERIAN	8.17	0.00	0.00	4.00	0.00	Dikecualikan	14.60	3.00	26.67	44.27	Kurang



No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
49	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	3.76	3.48	1.00	5.00	28.24	6.00	35.56	69.80	Cukup
50	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	KEMENTERIAN	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	12.86	40.00	52.86	Cukup
51	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	KEMENTERIAN	10.00	4.73	3.47	4.00	1.00	5.00	28.20	24.00	40.00	92.20	Sangat Baik
52	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	KEMENTERIAN	0.00	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	Dikecualikan	0.00	18.00	40.00	58.00	Cukup
53	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	KEMENTERIAN	10.00	5.00	3.42	4.00	1.00	5.00	28.42	15.00	40.00	83.42	Baik
54	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	KEMENTERIAN	8.17	0.00	0.00	4.00	0.00	Dikecualikan	14.60	3.00	26.67	44.27	Kurang
55	Kementerian Koperasi	KEMENTERIAN	9.48	4.30	5.00	3.92	1.00	4.70	28.40	23.18	40.00	91.58	Sangat Baik
56	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	KEMENTERIAN	9.98	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	18.98	30.00	40.00	88.98	Baik
57	Kementerian Luar Negeri	KEMENTERIAN	10.00	4.49	0.00	3.96	1.00	3.89	23.34	8.00	40.00	71.34	Baik
58	Kementerian Pariwisata	KEMENTERIAN	9.72	4.70	3.33	2.53	1.00	2.84	24.12	12.00	40.00	76.13	Baik
59	Kementerian Pekerjaan Umum	KEMENTERIAN	9.41	5.00	3.88	3.89	1.00	4.78	27.96	26.15	40.00	94.11	Sangat Baik
60	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	KEMENTERIAN	7.25	5.00	0.00	0.00	1.00	3.64	16.89	21.43	35.56	73.88	Baik
61	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN	10.00	5.00	4.07	4.00	1.00	5.00	29.07	19.09	40.00	88.16	Baik
62	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN	8.96	3.81	0.00	2.21	1.00	3.13	19.11	14.29	22.22	55.62	Cukup
63	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN	5.83	4.54	3.85	2.52	1.00	4.44	22.18	24.00	35.56	81.74	Baik
64	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	KEMENTERIAN	10.00	4.91	0.00	2.36	1.00	4.70	22.97	29.09	40.00	92.06	Sangat Baik
65	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	KEMENTERIAN	10.00	4.91	0.00	2.36	1.00	4.70	22.97	29.09	40.00	92.06	Sangat Baik
66	Kementerian Perdagangan	KEMENTERIAN	8.87	4.68	0.00	3.43	1.00	2.55	20.53	30.00	40.00	90.53	Sangat Baik
67	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	KEMENTERIAN	9.98	4.29	0.00	2.95	1.00	2.32	20.54	21.25	40.00	81.79	Baik
68	Kementerian Perhubungan	KEMENTERIAN	10.00	5.00	2.70	2.50	1.00	4.26	25.46	16.75	40.00	82.21	Baik
69	Kementerian Perindustrian	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	3.79	1.00	4.82	24.61	21.71	40.00	86.32	Baik
70	Kementerian Pertahanan	KEMENTERIAN	8.51	4.95	5.00	3.28	1.00	4.26	27.00	30.00	40.00	97.00	Sangat Baik
71	Kementerian Pertanian	KEMENTERIAN	10.00	4.67	0.00	0.00	1.00	3.99	19.66	17.25	40.00	76.91	Baik
72	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	KEMENTERIAN	9.41	5.00	3.88	3.89	1.00	4.78	27.96	25.89	40.00	93.85	Sangat Baik
73	Kementerian Sekretariat Negara	KEMENTERIAN	5.68	5.00	2.62	0.00	1.00	3.39	17.69	11.86	35.56	65.11	Cukup
74	Kementerian Sosial	KEMENTERIAN	10.00	5.00	0.00	3.60	1.00	3.75	23.35	26.00	35.56	84.91	Baik
75	Kementerian Transmigrasi	KEMENTERIAN	10.00	0.00	0.00	2.98	1.00	4.14	18.12	21.75	40.00	79.87	Baik
76	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	KEMENTERIAN	10.00	4.30	5.00	3.92	1.00	4.70	28.92	24.55	40.00	93.47	Sangat Baik
77	Kepolisian Negara Republik Indonesia	LEMBAGA	8.29	5.00	0.00	0.00	1.00	3.42	17.71	30.00	35.56	83.27	Baik
78	Komisi Pemberantasan Korupsi	LEMBAGA	10.00	5.00	3.67	3.73	1.00	4.35	27.75	15.52	35.56	78.83	Baik
79	Komisi Pemilihan Umum	LEMBAGA	10.00	2.79	0.00	0.00	1.00	3.82	17.61	7.40	17.78	42.79	Kurang
80	Komisi Yudisial	LEMBAGA	9.25	5.00	2.72	0.00	0.00	2.50	19.47	20.00	17.78	57.25	Cukup
81	Lembaga Administrasi Negara	LEMBAGA	10.00	5.00	2.69	3.17	1.00	4.77	26.63	22.50	31.11	80.24	Baik
82	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMBAGA	10.00	4.72	5.00	3.42	1.00	4.94	29.08	20.93	40.00	90.02	Sangat Baik
83	Lembaga Ketahanan Nasional	LEMBAGA	9.41	5.00	0.00	2.50	1.00	2.86	20.77	25.00	35.56	81.33	Baik
84	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	LEMBAGA	10.00	4.77	0.00	0.00	1.00	3.67	19.44	17.81	22.22	59.47	Cukup
85	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	LEMBAGA	9.73	5.00	0.00	3.34	1.00	3.79	22.86	11.32	35.56	69.74	Cukup
86	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia	LEMBAGA	10.00	5.00	5.00	2.46	1.00	5.00	28.46	15.00	0.00	43.46	Kurang
87	Mahkamah Agung	LEMBAGA	5.39	5.00	0.00	0.00	1.00	3.45	14.84	4.17	0.00	19.01	Kurang
88	Mahkamah Konstitusi RI	LEMBAGA	10.00	5.00	5.00	3.59	1.00	5.00	29.59	18.00	40.00	87.59	Baik
89	Ombudsman Republik Indonesia	LEMBAGA	10.00	5.00	5.00	3.80	1.00	3.75	28.55	21.00	40.00	89.55	Baik
90	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	LEMBAGA	8.51	4.62	2.83	0.00	0.00	3.25	19.21	25.71	22.22	67.14	Cukup
91	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	LEMBAGA	10.00	5.00	4.17	2.60	1.00	4.64	27.41	17.65	40.00	85.06	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
92	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	LEMBAGA	9.99	5.00	0.00	2.40	1.00	5.00	23.39	30.00	35.56	88.95	Baik
93	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	LEMBAGA	10.00	5.00	3.19	4.00	1.00	4.50	27.69	24.00	40.00	91.69	Sangat Baik
94	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	LEMBAGA	9.84	5.00	0.00	0.00	1.00	2.50	18.34	30.00	0.00	48.34	Kurang
95	Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	LEMBAGA	9.49	5.00	5.00	3.52	1.00	5.00	29.01	12.86	40.00	81.87	Baik
96	Tentara Nasional Indonesia	LEMBAGA	8.51	4.95	5.00	3.28	1.00	4.26	27.00	30.00	40.00	97.00	Sangat Baik
97	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	Provinsi	8.56	4.77	2.94	0.00	0.00	4.49	20.76	21.20	40.00	81.96	Baik
98	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Provinsi	10.00	5.00	4.88	3.94	1.00	4.99	29.81	27.39	40.00	97.21	Sangat Baik
99	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Provinsi	10.00	5.00	3.99	3.42	1.00	4.13	27.54	26.09	40.00	93.63	Sangat Baik
100	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	Provinsi	9.84	4.67	0.00	0.00	0.00	4.52	19.03	18.84	40.00	77.87	Baik
101	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta	Provinsi	10.00	5.00	3.56	3.83	1.00	4.89	28.28	18.67	40.00	86.95	Baik
102	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	10.00	5.00	4.97	2.39	1.00	4.71	28.07	18.21	40.00	86.28	Baik
103	Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	Provinsi	10.00	4.59	0.00	0.00	1.00	3.95	19.54	10.46	40.00	70.00	Cukup
104	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Provinsi	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.00	19.00	16.10	40.00	75.10	Baik
105	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi	10.00	5.00	5.00	3.61	1.00	4.74	29.35	29.10	40.00	98.45	Sangat Baik
106	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	10.00	5.00	3.87	2.96	1.00	4.94	27.77	24.51	40.00	92.29	Sangat Baik
107	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	10.00	4.97	2.72	2.97	1.00	3.89	25.55	26.37	40.00	91.92	Sangat Baik
108	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi	10.00	5.00	0.00	2.36	1.00	3.08	21.44	23.62	40.00	85.06	Baik
109	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	10.00	4.93	0.00	3.78	1.00	4.04	23.75	30.00	40.00	93.75	Sangat Baik
110	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	10.00	5.00	3.08	2.09	1.00	4.00	25.17	21.75	40.00	86.92	Baik
111	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	10.00	5.00	3.60	2.56	1.00	4.48	26.63	22.94	40.00	89.57	Baik
112	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi	9.62	4.67	0.00	2.54	1.00	4.17	22.00	30.00	40.00	92.00	Sangat Baik
113	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	10.00	5.00	2.71	2.67	1.00	4.52	25.90	22.67	40.00	88.57	Baik
114	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	10.00	5.00	3.52	3.03	1.00	4.06	26.61	26.09	40.00	92.70	Sangat Baik
115	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Provinsi	10.00	5.00	0.00	2.44	1.00	4.64	23.08	17.25	40.00	80.33	Baik
116	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Provinsi	10.00	4.74	2.87	0.00	1.00	4.53	23.13	20.83	40.00	83.96	Baik
117	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Provinsi	7.18	4.78	3.96	2.98	1.00	4.24	24.14	19.33	40.00	83.47	Baik
118	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi	10.00	4.52	3.70	0.00	1.00	4.19	23.41	22.65	40.00	86.06	Baik
119	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi	7.81	4.52	3.64	0.00	1.00	4.24	21.21	21.00	40.00	82.21	Baik
120	Pemerintah Daerah Provinsi Papua	Provinsi	8.88	4.77	0.00	0.00	1.00	2.44	17.09	19.32	40.00	76.41	Baik
121	Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat	Provinsi	5.22	4.49	0.00	0.00	1.00	4.16	14.87	0.00	35.56	50.43	Cukup
122	Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Provinsi	6.92	5.00	0.00	0.00	1.00	4.28	17.20	18.46	40.00	75.66	Baik
123	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi	9.99	5.00	2.75	0.00	1.00	4.39	23.13	19.09	40.00	82.22	Baik
124	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	9.92	5.00	2.80	0.00	1.00	4.24	22.96	28.04	40.00	91.00	Sangat Baik
125	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi	10.00	3.76	3.84	0.00	1.00	4.29	22.89	18.00	40.00	80.89	Baik
126	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi	10.00	4.95	4.30	0.00	1.00	4.67	24.92	27.69	40.00	92.61	Sangat Baik
127	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi	10.00	5.00	3.15	0.00	1.00	4.17	23.32	20.91	40.00	84.23	Baik
128	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	10.00	5.00	4.21	2.35	1.00	4.72	27.28	26.87	40.00	94.15	Sangat Baik
129	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.90	19.90	21.29	40.00	81.19	Baik
130	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.09	20.09	22.38	40.00	82.47	Baik
131	Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi	0.00	4.82	3.62	0.00	0.00	2.58	11.02	12.69	26.67	50.38	Cukup
132	Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	4.09	7.72	0.00	22.22	29.94	Kurang
133	Provinsi Papua Selatan	Provinsi	8.19	4.58	0.00	0.00	0.00	4.54	17.31	0.00	26.67	43.98	Kurang
134	Provinsi Papua Tengah	Provinsi	10.00	5.00	3.04	0.00	0.00	4.85	22.89	30.00	17.78	70.67	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
135	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten	5.22	4.86	3.68	0.00	0.00	4.44	18.20	3.21	35.56	56.97	Cukup
136	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten	10.00	2.95	0.00	0.00	0.00	4.50	17.45	13.64	35.56	66.65	Cukup
137	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	9.90	4.93	3.30	0.00	0.00	2.31	20.44	16.88	31.11	68.43	Cukup
138	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	7.31	4.97	4.10	0.00	0.00	3.77	20.15	16.88	40.00	77.03	Baik
139	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	10.00	4.87	3.75	0.00	0.00	3.58	22.20	10.00	40.00	72.20	Baik
140	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten	0.00	5.00	3.97	0.00	0.00	3.46	12.43	7.50	31.11	51.04	Cukup
141	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	10.00	5.00	2.66	0.00	0.00	4.06	21.72	18.75	40.00	80.47	Baik
142	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	10.00	4.97	0.00	0.00	0.00	3.77	18.74	6.82	40.00	65.56	Cukup
143	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten	9.61	4.92	2.94	0.00	0.00	3.46	20.93	13.04	17.78	51.75	Cukup
144	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten	9.45	4.35	3.27	0.00	0.00	4.24	21.31	15.71	35.56	72.58	Baik
145	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	10.00	5.00	3.43	0.00	0.00	4.75	23.18	14.45	35.56	73.19	Baik
146	Pemerintah Daerah Kabupaten Agam	Kabupaten	8.61	4.30	0.00	0.00	0.00	5.00	17.91	16.96	40.00	74.87	Baik
147	Pemerintah Daerah Kabupaten Alor	Kabupaten	0.00	4.99	3.30	0.00	0.00	4.87	13.16	22.50	22.22	57.88	Cukup
148	Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan	Kabupaten	10.00	4.87	2.92	0.00	0.00	4.13	21.92	18.26	40.00	80.18	Baik
149	Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat	Kabupaten	5.68	4.97	0.00	0.00	0.00	4.41	15.06	0.00	31.11	46.17	Kurang
150	Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kabupaten	10.00	4.77	2.89	3.55	1.00	4.28	26.49	18.18	40.00	84.67	Baik
151	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	Kabupaten	10.00	4.91	4.15	2.16	1.00	3.94	26.15	20.87	40.00	87.02	Baik
152	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	Kabupaten	10.00	4.84	3.59	0.00	1.00	4.70	24.13	15.00	40.00	79.13	Baik
153	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten	9.37	3.53	3.54	0.00	1.00	4.74	22.18	23.33	40.00	85.51	Baik
154	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	Kabupaten	10.00	5.00	4.35	0.00	1.00	3.94	24.29	24.78	40.00	89.07	Baik
155	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	0.00	0.00	3.53	18.46	16.00	35.56	70.02	Baik
156	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	Kabupaten	10.00	4.98	4.10	0.00	0.00	3.88	22.96	27.00	35.56	85.52	Baik
157	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka	Kabupaten	9.40	4.98	3.38	0.00	0.00	4.10	21.86	21.00	40.00	82.86	Baik
158	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.12	20.12	25.71	40.00	85.83	Baik
159	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten	10.00	4.61	0.00	0.00	1.00	2.03	17.64	18.00	35.56	71.20	Baik
160	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten	10.00	4.56	0.00	2.06	0.00	3.93	20.55	19.29	40.00	79.84	Baik
161	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	Kabupaten	9.21	4.83	2.68	0.00	1.00	4.91	22.63	9.00	40.00	71.63	Baik
162	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli	Kabupaten	10.00	5.00	3.70	3.33	1.00	4.93	27.96	19.57	40.00	87.53	Baik
163	Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar	Kabupaten	10.00	5.00	3.50	2.47	1.00	4.74	26.72	20.40	40.00	87.12	Baik
164	Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten	10.00	5.00	2.91	2.50	0.00	4.33	24.74	15.00	35.56	75.30	Baik
165	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng	Kabupaten	5.59	0.00	3.57	0.00	0.00	3.89	13.05	12.00	31.11	56.16	Cukup
166	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kabupaten	9.99	5.00	3.02	2.57	1.00	4.97	26.56	20.77	40.00	87.33	Baik
167	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin	Kabupaten	9.95	4.82	3.54	2.86	0.00	4.87	26.04	16.00	40.00	82.04	Baik
168	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	Kabupaten	10.00	4.78	0.00	3.02	1.00	4.49	23.29	20.00	35.56	78.85	Baik
169	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten	10.00	4.50	4.69	3.74	1.00	4.87	28.79	20.00	40.00	88.79	Baik
170	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten	10.00	5.00	4.34	3.02	1.00	4.16	27.51	23.08	40.00	90.59	Sangat Baik
171	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	10.00	4.75	3.40	0.00	0.00	4.15	22.30	24.55	40.00	86.85	Baik
172	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	Kabupaten	10.00	4.74	4.64	2.77	1.00	4.82	27.97	17.14	35.56	80.67	Baik
173	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara	Kabupaten	9.54	4.90	3.17	2.68	0.00	4.17	24.46	28.85	35.56	88.87	Baik
174	Pemerintah Daerah Kabupaten Barru	Kabupaten	9.98	4.98	3.33	0.00	1.00	3.56	22.85	15.88	35.56	74.29	Baik
175	Pemerintah Daerah Kabupaten Batang	Kabupaten	9.85	5.00	3.58	3.20	1.00	4.66	27.29	22.17	40.00	89.46	Baik
176	Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari	Kabupaten	10.00	3.39	2.59	0.00	1.00	4.00	20.98	10.91	40.00	71.89	Baik
177	Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara	Kabupaten	9.43	4.72	0.00	2.32	0.00	4.56	21.03	22.00	40.00	83.03	Baik
178	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	Kabupaten	10.00	5.00	3.95	0.00	1.00	4.43	24.38	18.00	40.00	82.38	Baik
179	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung	Kabupaten	9.45	4.86	2.87	2.44	0.00	4.68	24.30	11.47	40.00	75.77	Baik
180	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten	9.92	4.75	3.97	3.03	0.00	4.33	25.99	22.50	40.00	88.49	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
181	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu	Kabupaten	9.82	4.93	3.57	0.00	0.00	4.66	22.98	9.00	26.67	58.65	Cukup
182	Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten	10.00	4.93	3.61	0.00	1.00	4.98	24.53	15.88	40.00	80.41	Baik
183	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	0.00	4.91	3.85	0.00	0.00	4.66	13.42	14.00	22.22	49.64	Kurang
184	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	Kabupaten	10.00	4.97	4.27	3.03	0.00	4.52	26.80	23.08	40.00	89.88	Baik
185	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten	7.53	5.00	3.25	0.00	0.00	4.83	20.61	12.27	35.56	68.44	Cukup
186	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten	10.00	5.00	4.01	2.44	0.00	2.88	24.33	22.00	35.56	81.89	Baik
187	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten	10.00	4.94	2.74	0.00	0.00	4.39	22.07	23.08	35.56	80.71	Baik
188	Pemerintah Daerah Kabupaten Berau	Kabupaten	10.00	5.00	3.19	0.00	0.00	3.34	21.53	18.46	40.00	79.99	Baik
189	Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten	7.82	5.00	3.59	0.00	0.00	4.97	21.38	0.00	26.67	48.05	Kurang
190	Pemerintah Daerah Kabupaten Bima	Kabupaten	8.57	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	8.57	35.56	57.09	Cukup
191	Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	Kabupaten	10.00	4.97	2.99	2.53	0.00	4.36	24.85	18.26	40.00	83.11	Baik
192	Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen	Kabupaten	10.00	4.99	3.42	0.00	1.00	4.70	24.11	2.61	22.22	48.94	Kurang
193	Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	Kabupaten	10.00	5.00	3.64	0.00	1.00	4.45	24.09	22.76	40.00	86.85	Baik
194	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	Kabupaten	10.00	5.00	3.61	2.86	0.00	4.85	26.32	25.00	40.00	91.32	Sangat Baik
195	Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo	Kabupaten	9.09	4.90	2.97	0.00	1.00	3.93	21.88	24.00	35.56	81.44	Baik
196	Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Kabupaten	9.00	4.77	2.81	0.00	0.00	4.18	20.77	23.89	40.00	84.66	Baik
197	Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	10.00	4.85	4.27	0.00	0.00	4.52	23.65	19.59	40.00	83.24	Baik
198	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Kabupaten	9.92	5.00	3.95	3.79	0.00	4.17	26.83	10.50	35.56	72.89	Baik
199	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.92	17.92	9.00	35.56	62.48	Cukup
200	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	10.00	4.67	3.30	0.00	0.00	3.50	21.47	16.37	35.56	73.40	Baik
201	Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten	10.00	5.00	3.72	0.00	0.00	3.95	22.67	18.00	40.00	80.67	Baik
202	Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana	Kabupaten	8.68	5.00	3.44	0.00	0.00	3.66	20.78	18.89	35.56	75.23	Baik
203	Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	10.00	3.83	2.95	0.00	0.00	3.88	20.66	12.00	40.00	72.66	Baik
204	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	Kabupaten	10.00	4.85	0.00	0.00	0.00	3.76	18.61	17.78	35.56	71.95	Baik
205	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.78	18.78	18.00	35.56	72.34	Baik
206	Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel	Kabupaten	10.00	4.86	0.00	0.00	0.00	1.62	16.48	6.00	22.22	44.70	Kurang
207	Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali	Kabupaten	9.91	5.00	0.00	0.00	1.00	4.36	20.27	16.50	40.00	76.77	Baik
208	Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Kabupaten	10.00	4.99	3.05	2.57	1.00	4.51	26.12	24.00	40.00	90.12	Sangat Baik
209	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Kabupaten	10.00	4.96	0.00	2.68	1.00	4.96	23.60	24.38	40.00	87.98	Baik
210	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	Kabupaten	10.00	5.00	2.57	0.00	1.00	4.31	22.88	12.27	13.33	48.48	Kurang
211	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan	Kabupaten	10.00	4.96	4.03	0.00	0.00	4.15	23.14	24.38	40.00	87.52	Baik
212	Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo	Kabupaten	10.00	4.98	3.29	2.54	1.00	4.19	26.00	17.31	40.00	83.31	Baik
213	Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	Kabupaten	10.00	5.00	4.07	0.00	1.00	4.16	24.23	22.50	35.56	82.29	Baik
214	Pemerintah Daerah Kabupaten Buru	Kabupaten	6.39	4.27	4.17	0.00	0.00	3.19	18.02	9.38	4.44	31.84	Kurang
215	Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten	0.00	5.00	4.25	0.00	0.00	4.36	13.61	7.83	4.44	25.88	Kurang
216	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2.42	22.42	11.67	40.00	74.09	Baik
217	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten	9.38	4.93	4.13	0.00	0.00	3.83	22.27	2.73	35.56	60.56	Cukup
218	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten	9.12	4.63	0.00	0.00	0.00	4.28	18.03	24.00	40.00	82.03	Baik
219	Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara	Kabupaten	10.00	4.04	4.28	0.00	0.00	4.91	23.23	30.00	35.56	88.79	Baik
220	Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis	Kabupaten	10.00	5.00	4.57	3.52	1.00	4.45	28.54	21.00	40.00	89.54	Baik
221	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	Kabupaten	10.00	4.43	3.39	2.28	1.00	4.79	25.89	13.00	40.00	78.89	Baik
222	Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	Kabupaten	10.00	5.00	3.61	2.55	1.00	4.91	27.07	17.69	40.00	84.76	Baik
223	Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	Kabupaten	7.43	4.92	2.53	0.00	1.00	4.56	20.44	22.86	40.00	83.30	Baik
224	Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi	Kabupaten	8.15	4.83	0.00	0.00	1.00	4.19	18.17	10.00	13.33	41.50	Kurang
225	Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai	Kabupaten	10.00	4.28	0.00	0.00	0.00	5.00	19.28	0.00	31.11	50.39	Cukup
226	Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	10.00	5.00	2.62	0.00	0.00	2.86	20.48	20.00	35.56	76.04	Baik
227	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	Kabupaten	10.00	5.00	4.43	2.54	1.00	4.68	27.65	13.85	40.00	81.50	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
228	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	10.00	4.47	0.00	3.06	0.00	3.18	20.71	13.50	40.00	74.21	Baik
229	Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai	Kabupaten	10.00	4.63	0.00	0.00	0.00	5.00	19.63	0.00	8.89	28.52	Kurang
230	Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu	Kabupaten	10.00	5.00	2.71	0.00	1.00	3.16	21.87	24.00	40.00	85.87	Baik
231	Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	Kabupaten	8.95	5.00	2.95	0.00	0.00	3.82	20.72	21.18	35.56	77.46	Baik
232	Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten	5.79	4.94	0.00	0.00	0.00	2.55	13.28	0.00	17.78	31.06	Kurang
233	Pemerintah Daerah Kabupaten Ende	Kabupaten	10.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.13	18.46	10.59	17.78	46.83	Kurang
234	Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	Kabupaten	10.00	5.00	3.92	0.00	1.00	3.77	23.69	10.91	35.56	70.16	Baik
235	Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak	Kabupaten	0.00	4.76	3.88	0.00	0.00	4.56	13.20	9.13	31.11	53.44	Cukup
236	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Kabupaten	0.00	4.98	4.45	0.00	0.00	2.77	12.20	6.00	13.33	31.53	Kurang
237	Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	Kabupaten	10.00	5.00	4.43	3.28	1.00	4.41	28.12	22.50	40.00	90.62	Sangat Baik
238	Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	3.69	13.69	21.25	22.22	57.16	Cukup
239	Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar	Kabupaten	10.00	5.00	3.55	3.50	1.00	4.83	27.88	30.00	40.00	97.88	Sangat Baik
240	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	Kabupaten	8.16	3.63	2.88	0.00	1.00	3.77	19.44	10.34	40.00	69.78	Cukup
241	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.24	19.24	12.86	35.56	67.66	Cukup
242	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Kabupaten	10.00	4.16	3.71	3.75	1.00	3.88	26.50	16.07	35.56	78.13	Baik
243	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Kabupaten	9.17	5.00	3.02	2.92	1.00	4.84	25.95	19.71	40.00	85.66	Baik
244	Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan	Kabupaten	10.00	5.00	3.55	2.06	1.00	4.74	26.35	20.77	40.00	87.12	Baik
245	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten	10.00	5.00	3.10	2.59	1.00	4.57	26.26	19.69	40.00	85.95	Baik
246	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	3.10	1.00	4.22	23.32	12.50	35.56	71.38	Baik
247	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten	8.48	4.53	2.99	0.00	0.00	4.67	20.66	3.00	17.78	41.44	Kurang
248	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten	10.00	4.08	3.89	2.59	0.00	4.87	25.42	6.21	35.56	67.19	Cukup
249	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten	8.89	3.91	0.00	0.00	0.00	3.57	16.37	8.00	22.22	46.59	Kurang
250	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten	9.87	4.96	3.21	0.00	0.00	4.82	22.85	10.00	35.56	68.41	Cukup
251	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	2.44	6.65	2.14	26.67	35.46	Kurang
252	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	3.54	1.00	4.89	29.43	22.80	40.00	92.23	Sangat Baik
253	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	10.00	4.72	0.00	0.00	0.00	2.94	17.65	20.87	40.00	78.52	Baik
254	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten	10.00	4.79	4.12	3.90	1.00	4.82	28.62	18.26	40.00	86.88	Baik
255	Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten	9.37	4.83	4.38	0.00	0.00	4.11	22.69	8.89	35.56	67.14	Cukup
256	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten	10.00	3.48	2.74	0.00	1.00	4.45	21.67	7.78	40.00	69.45	Cukup
257	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten	9.47	4.96	3.29	0.00	1.00	4.79	23.51	9.55	40.00	73.06	Baik
258	Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu	Kabupaten	0.00	5.00	4.44	0.00	0.00	3.90	13.34	13.04	40.00	66.38	Cukup
259	Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten	10.00	5.00	2.88	0.00	0.00	4.62	22.50	0.00	31.11	53.61	Cukup
260	Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura	Kabupaten	9.93	5.00	5.00	0.00	0.00	4.46	24.39	0.00	35.56	59.95	Cukup
261	Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.79	0.00	4.44	15.23	Kurang
262	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Kabupaten	9.92	5.00	0.00	0.00	1.00	2.52	18.44	21.60	40.00	80.04	Baik
263	Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana	Kabupaten	10.00	4.71	2.84	2.46	1.00	4.63	25.64	30.00	40.00	95.64	Sangat Baik
264	Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto	Kabupaten	10.00	4.90	2.92	0.00	1.00	2.86	21.68	10.59	17.78	50.05	Cukup
265	Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara	Kabupaten	10.00	5.00	4.51	0.00	1.00	4.93	25.44	19.00	40.00	84.44	Baik
266	Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang	Kabupaten	10.00	4.46	4.58	2.89	0.00	4.35	26.27	14.06	40.00	80.33	Baik
267	Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana	Kabupaten	0.00	4.31	4.82	0.00	0.00	4.24	13.37	0.00	13.33	26.70	Kurang
268	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	Kabupaten	9.62	4.59	4.10	0.00	1.00	3.59	22.90	14.06	35.56	72.52	Baik
269	Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	Kabupaten	10.00	4.61	3.35	0.00	0.00	4.34	22.30	9.55	35.56	67.41	Cukup
270	Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten	10.00	5.00	3.91	0.00	0.00	4.77	23.68	18.95	35.56	78.19	Baik
271	Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.37	20.37	13.93	35.56	69.86	Cukup

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
272	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10.00	4.86	2.96	3.65	1.00	4.94	27.42	9.55	40.00	76.97	Baik
273	Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10.00	5.00	2.72	3.28	1.00	4.32	26.33	26.36	40.00	92.69	Sangat Baik
274	Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun	Kabupaten	10.00	5.00	3.41	0.00	0.00	4.44	22.85	23.48	40.00	86.33	Baik
275	Pemerintah Daerah Kabupaten Karo	Kabupaten	7.53	4.75	0.00	0.00	0.00	3.80	16.09	5.72	35.56	57.37	Cukup
276	Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan	Kabupaten	10.00	5.00	2.93	2.35	1.00	4.22	25.49	22.94	40.00	88.43	Baik
277	Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur	Kabupaten	7.61	5.00	4.13	3.05	0.00	3.51	23.30	0.00	17.78	41.08	Kurang
278	Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten	10.00	4.64	2.73	0.00	0.00	4.58	21.95	30.00	35.56	87.51	Baik
279	Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten	10.00	5.00	3.13	3.23	0.00	4.61	25.97	18.39	40.00	84.36	Baik
280	Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri	Kabupaten	10.00	5.00	2.67	2.48	1.00	4.62	25.77	15.37	35.56	76.70	Baik
281	Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom	Kabupaten	5.33	4.70	0.00	0.00	0.00	4.00	14.02	0.00	13.33	27.35	Kurang
282	Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Kabupaten	10.00	4.90	0.00	0.00	1.00	4.68	20.58	22.94	40.00	83.52	Baik
283	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.97	19.97	3.00	26.67	49.64	Kurang
284	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten	10.00	3.82	2.65	2.70	1.00	4.55	24.72	26.00	40.00	90.72	Sangat Baik
285	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru	Kabupaten	10.00	4.18	2.64	0.00	0.00	4.23	21.05	21.00	31.11	73.16	Baik
286	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten	10.00	5.00	3.13	0.00	0.00	4.73	22.86	10.43	40.00	73.29	Baik
287	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.97	0.00	3.45	21.42	6.92	40.00	68.34	Cukup
288	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten	10.00	4.89	2.78	0.00	0.00	3.94	21.62	20.63	35.56	77.81	Baik
289	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten	10.00	4.91	3.33	0.00	1.00	4.11	23.35	17.50	17.78	58.63	Cukup
290	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten	9.75	4.60	2.99	2.97	0.00	4.74	25.05	10.91	35.56	71.52	Baik
291	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten	0.00	5.00	4.67	0.00	1.00	5.00	15.67	0.00	4.44	20.11	Kurang
292	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	Kabupaten	7.52	5.00	5.00	2.13	0.00	4.94	24.59	0.00	31.11	55.70	Cukup
293	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten	8.45	5.00	3.22	0.00	0.00	4.18	20.85	18.00	31.11	69.96	Cukup
294	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen	Kabupaten	10.00	4.74	4.58	0.00	0.00	3.40	22.72	0.00	31.11	53.83	Cukup
295	Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	Kabupaten	7.25	4.94	4.32	0.00	1.00	4.94	22.45	10.00	40.00	72.45	Baik
296	Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang	Kabupaten	10.00	4.58	4.48	3.81	1.00	4.69	28.56	17.42	40.00	85.98	Baik
297	Pemerintah Daerah Kabupaten Klanten	Kabupaten	10.00	4.90	3.46	0.00	1.00	3.60	22.96	4.44	35.56	62.96	Cukup
298	Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Kabupaten	10.00	5.00	4.16	3.93	1.00	5.00	29.09	26.76	40.00	95.85	Sangat Baik
299	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka	Kabupaten	10.00	4.96	4.09	0.00	0.00	4.98	24.03	16.37	35.56	75.96	Baik
300	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur	Kabupaten	9.45	5.00	3.20	0.00	0.00	3.31	20.96	15.00	35.56	71.52	Baik
301	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten	10.00	4.83	2.68	0.00	0.00	4.36	21.87	27.27	35.56	84.70	Baik
302	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe	Kabupaten	7.58	4.98	0.00	0.00	1.00	4.36	17.92	11.25	35.56	64.73	Cukup
303	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan	Kabupaten	8.51	5.00	0.00	0.00	0.00	4.76	18.27	15.88	40.00	74.15	Baik
304	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten	7.09	4.75	0.00	0.00	1.00	4.03	16.87	24.00	40.00	80.87	Baik
305	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten	10.00	3.75	0.00	0.00	0.00	4.23	17.98	21.82	35.56	75.36	Baik
306	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru	Kabupaten	10.00	4.67	3.15	2.46	1.00	3.41	24.69	22.22	40.00	86.91	Baik
307	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten	10.00	5.00	3.95	2.71	1.00	4.61	27.27	23.00	40.00	90.27	Sangat Baik
308	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten	10.00	4.56	2.91	3.58	1.00	4.70	26.75	25.20	40.00	91.95	Sangat Baik
309	Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten	0.00	5.00	4.61	0.00	1.00	4.85	15.46	11.05	31.11	57.62	Cukup
310	Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten	9.85	4.71	0.00	2.42	1.00	4.38	22.36	27.50	40.00	89.86	Baik
311	Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Kabupaten	10.00	5.00	3.89	2.27	1.00	4.57	26.73	22.50	40.00	89.23	Baik
312	Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten	9.99	5.00	0.00	2.09	1.00	4.52	22.60	23.75	40.00	86.35	Baik
313	Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan	Kabupaten	10.00	3.80	2.84	0.00	1.00	4.99	22.63	20.77	40.00	83.40	Baik
314	Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang	Kabupaten	9.04	4.78	4.09	0.00	0.00	3.59	21.50	21.00	40.00	82.50	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
315	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten	7.77	4.72	0.00	0.00	1.00	3.29	16.78	24.20	35.56	76.54	Baik
316	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten	10.00	4.91	4.59	2.50	1.00	4.34	27.34	13.67	40.00	81.01	Baik
317	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten	8.61	4.44	0.00	0.00	0.00	4.02	17.07	20.00	40.00	77.07	Baik
318	Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kabupaten	9.20	4.89	3.10	0.00	0.00	4.95	22.14	8.00	13.33	43.47	Kurang
319	Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten	10.00	4.98	2.78	0.00	0.00	4.77	22.53	15.88	35.56	73.97	Baik
320	Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten	8.90	5.00	3.86	2.27	0.00	4.00	24.03	11.54	40.00	75.57	Baik
321	Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat	Kabupaten	5.98	4.94	4.57	0.00	0.00	3.79	19.28	13.33	35.56	68.17	Cukup
322	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau	Kabupaten	10.00	5.00	3.88	2.75	1.00	4.77	27.40	16.00	40.00	83.40	Baik
323	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Kabupaten	9.90	4.67	3.76	3.18	1.00	4.65	27.17	10.91	31.11	69.19	Cukup
324	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten	9.99	5.00	3.97	0.00	1.00	2.71	22.67	21.11	35.56	79.34	Baik
325	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	4.53	3.70	1.00	4.92	29.15	24.00	40.00	93.15	Sangat Baik
326	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten	9.55	5.00	0.00	3.47	1.00	3.47	22.49	26.90	40.00	89.39	Baik
327	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten	10.00	4.94	0.00	0.00	0.00	3.73	18.67	12.00	26.67	57.34	Cukup
328	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten	9.99	4.54	3.43	3.92	0.00	4.89	26.77	14.21	35.56	76.54	Baik
329	Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Kabupaten	10.00	4.84	4.18	2.46	1.00	4.70	27.18	22.17	40.00	89.35	Baik
330	Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat	Kabupaten	9.06	4.95	3.43	0.00	0.00	2.47	19.90	22.17	31.11	73.18	Baik
331	Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	13.33	28.33	Kurang
332	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Kabupaten	10.00	5.00	3.76	0.00	1.00	4.42	24.18	22.80	40.00	86.98	Baik
333	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong	Kabupaten	10.00	5.00	4.79	0.00	0.00	4.94	24.73	6.32	26.67	57.72	Cukup
334	Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata	Kabupaten	10.00	4.84	5.00	0.00	0.00	4.97	24.81	15.00	22.22	62.03	Cukup
335	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten	7.57	0.00	4.04	0.00	0.00	4.81	16.42	21.60	40.00	78.02	Baik
336	Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga	Kabupaten	10.00	5.00	3.35	0.00	1.00	4.75	24.10	13.85	40.00	77.95	Baik
337	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten	10.00	5.00	4.94	3.95	1.00	4.84	29.73	13.93	40.00	83.66	Baik
338	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten	10.00	4.99	0.00	0.00	1.00	3.28	19.27	15.00	40.00	74.27	Baik
339	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten	9.64	4.81	0.00	0.00	0.00	3.03	17.48	6.21	40.00	63.69	Cukup
340	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	2.20	18.20	9.47	31.11	58.78	Cukup
341	Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	Kabupaten	10.00	4.43	3.01	2.71	1.00	4.86	26.01	6.67	35.56	68.24	Cukup
342	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Kabupaten	6.24	5.00	3.33	0.00	1.00	4.05	19.62	21.82	35.56	77.00	Baik
343	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten	10.00	5.00	3.33	2.11	1.00	4.23	25.67	26.40	35.56	87.63	Baik
344	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten	7.93	4.18	0.00	0.00	0.00	3.70	15.81	14.12	26.67	56.60	Cukup
345	Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	Kabupaten	10.00	5.00	3.96	2.60	1.00	4.86	27.42	16.96	40.00	84.38	Baik
346	Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang	Kabupaten	10.00	5.00	3.96	3.63	1.00	4.74	28.33	21.11	40.00	89.44	Baik
347	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan	Kabupaten	10.00	4.28	3.84	3.24	1.00	4.63	26.99	23.23	40.00	90.22	Sangat Baik
348	Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Kabupaten	10.00	4.39	0.00	0.00	0.00	4.09	18.48	5.00	35.56	59.04	Cukup
349	Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	Kabupaten	10.00	5.00	4.29	3.02	1.00	4.59	27.90	21.54	40.00	89.44	Baik
350	Pemerintah Daerah Kabupaten Majene	Kabupaten	0.00	4.86	3.74	0.00	0.00	3.71	12.31	27.00	22.22	61.53	Cukup
351	Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.73	8.73	24.00	8.89	41.62	Kurang
352	Pemerintah Daerah Kabupaten Malang	Kabupaten	10.00	5.00	4.24	2.99	1.00	4.99	28.22	14.18	40.00	82.40	Baik
353	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau	Kabupaten	10.00	4.80	3.71	3.03	0.00	4.56	26.10	16.88	35.56	78.54	Baik
354	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya	Kabupaten	9.70	4.72	0.00	0.00	0.00	3.08	17.50	0.00	22.22	39.72	Kurang
355	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten	10.00	4.36	0.00	0.00	1.00	3.57	18.93	1.82	35.56	56.31	Cukup
356	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten	8.20	4.75	0.00	0.00	0.00	2.23	15.18	16.00	35.56	66.74	Cukup
357	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa	Kabupaten	8.35	4.87	0.00	0.00	0.00	2.70	15.92	2.50	17.78	36.20	Kurang
358	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya	Kabupaten	5.81	4.87	0.00	3.82	0.00	4.49	18.99	0.00	13.33	32.32	Kurang

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
359	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah	Kabupaten	9.99	4.94	5.00	3.82	0.00	5.00	28.75	0.00	8.89	37.64	Kurang
360	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju	Kabupaten	10.00	4.83	2.76	0.00	0.00	3.66	21.25	21.00	35.56	77.81	Baik
361	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.53	19.53	6.00	35.56	61.09	Cukup
362	Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	6.97	4.86	3.30	0.00	0.00	4.27	19.40	18.00	26.67	64.07	Cukup
363	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	Kabupaten	10.00	4.88	3.43	0.00	1.00	4.90	24.21	22.86	31.11	78.18	Baik
364	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten	8.63	4.42	3.95	0.00	1.00	4.94	22.94	4.50	13.33	40.77	Kurang
365	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten	8.56	4.88	2.87	0.00	0.00	4.91	21.22	18.89	26.67	66.78	Cukup
366	Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	13.07	0.00	31.11	44.18	Kurang
367	Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	22.22	29.22	Kurang
368	Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.72	19.72	0.00	13.33	33.05	Kurang
369	Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	Kabupaten	10.00	5.00	4.35	2.97	0.00	3.45	25.77	14.08	35.56	75.41	Baik
370	Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat	Kabupaten	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	4.89	9.77	0.00	0.00	9.77	Kurang
371	Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi	Kabupaten	10.00	4.99	0.00	2.30	0.00	3.19	20.48	12.00	35.56	68.04	Cukup
372	Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Kabupaten	10.00	4.59	4.50	2.34	1.00	3.91	26.34	18.95	35.56	80.85	Baik
373	Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin	Kabupaten	10.00	4.75	0.00	0.00	1.00	3.61	19.36	5.81	40.00	65.17	Cukup
374	Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke	Kabupaten	9.55	5.00	3.35	0.00	0.00	4.53	22.43	3.00	40.00	65.43	Cukup
375	Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji	Kabupaten	10.00	4.88	0.00	0.00	1.00	4.63	20.51	20.87	40.00	81.38	Baik
376	Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	Kabupaten	10.00	5.00	3.45	0.00	0.00	4.80	23.25	2.40	35.56	61.21	Cukup
377	Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.32	18.32	21.82	35.56	75.70	Baik
378	Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	3.67	0.00	0.00	4.05	22.72	9.23	40.00	71.95	Baik
379	Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten	10.00	4.86	2.70	0.00	0.00	4.17	21.73	13.64	40.00	75.37	Baik
380	Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten	9.81	5.00	0.00	3.46	1.00	4.15	23.42	27.50	40.00	90.92	Sangat Baik
381	Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	10.00	5.00	4.21	2.58	1.00	4.31	27.10	20.30	40.00	87.40	Baik
382	Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	Kabupaten	10.00	5.00	3.63	0.00	0.00	3.03	21.66	12.50	40.00	74.16	Baik
383	Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten	9.26	4.59	3.76	0.00	1.00	4.24	22.85	20.00	40.00	82.85	Baik
384	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim	Kabupaten	9.89	4.89	2.67	0.00	1.00	1.93	20.38	19.41	35.56	75.35	Baik
385	Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten	10.00	4.96	3.24	0.00	0.00	4.42	22.62	19.41	22.22	64.25	Cukup
386	Pemerintah Daerah Kabupaten Muko-Muko	Kabupaten	8.82	4.98	0.00	2.26	1.00	3.59	20.65	19.29	35.56	75.50	Baik
387	Pemerintah Daerah Kabupaten Muna	Kabupaten	10.00	4.27	2.60	0.00	0.00	1.34	18.21	10.00	40.00	68.21	Cukup
388	Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat	Kabupaten	8.21	4.97	3.53	3.56	0.00	4.79	25.06	30.00	35.56	90.62	Sangat Baik
389	Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya	Kabupaten	10.00	4.56	3.65	0.00	0.00	4.88	23.09	28.64	40.00	91.73	Sangat Baik
390	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten	10.00	4.77	4.06	0.00	1.00	4.07	23.90	28.38	40.00	92.28	Sangat Baik
391	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten	10.00	4.96	4.55	0.00	0.00	4.34	23.85	11.74	22.22	57.81	Cukup
392	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten	10.00	4.82	0.00	0.00	0.00	4.22	19.04	9.68	40.00	68.72	Cukup
393	Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire	Kabupaten	0.00	4.97	4.24	0.00	0.00	4.75	13.96	0.00	31.11	45.07	Kurang
394	Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten	6.54	5.00	4.77	0.00	0.00	3.69	20.00	11.47	17.78	49.25	Kurang
395	Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo	Kabupaten	10.00	4.86	0.00	2.08	0.00	4.78	21.72	19.41	40.00	81.13	Baik
396	Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna	Kabupaten	10.00	4.98	3.24	2.20	1.00	4.99	26.41	20.69	40.00	87.10	Baik
397	Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga	Kabupaten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	Kurang
398	Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada	Kabupaten	10.00	4.99	2.88	0.00	1.00	4.00	22.88	18.00	35.56	76.44	Baik
399	Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	10.00	5.00	3.96	0.00	0.00	4.02	22.98	20.40	40.00	83.38	Baik
400	Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Kabupaten	10.00	5.00	3.61	3.68	0.00	4.83	27.11	24.23	40.00	91.34	Sangat Baik
401	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.65	18.65	12.50	40.00	71.15	Baik
402	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat	Kabupaten	10.00	4.88	3.13	0.00	0.00	3.60	21.61	30.00	13.33	64.94	Cukup
403	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten	8.34	4.89	3.13	0.00	0.00	4.89	21.25	2.50	31.11	54.86	Cukup
404	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara	Kabupaten	9.36	4.99	4.18	0.00	0.00	3.57	22.10	6.92	17.78	46.80	Kurang
405	Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan	Kabupaten	10.00	5.00	3.52	0.00	1.00	4.32	23.84	16.67	40.00	80.51	Baik
406	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten	10.00	4.91	2.79	0.00	0.00	4.86	22.56	13.13	40.00	75.69	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
407	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten	10.00	4.92	4.07	2.62	1.00	4.60	27.21	10.39	40.00	77.60	Baik
408	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten	6.76	4.67	3.84	0.00	0.00	4.21	19.48	20.45	40.00	79.93	Baik
409	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	3.05	0.00	0.00	4.02	22.07	4.61	35.56	62.24	Cukup
410	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kabupaten	10.00	4.89	4.30	0.00	0.00	4.71	23.90	13.55	35.56	73.01	Baik
411	Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Kabupaten	10.00	5.00	4.71	3.03	0.00	4.45	27.18	15.65	40.00	82.83	Baik
412	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten	7.39	5.00	0.00	0.00	0.00	3.71	16.10	8.00	26.67	50.77	Cukup
413	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	13.33	18.21	Kurang
414	Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten	7.45	5.00	0.00	0.00	0.00	2.93	15.38	14.29	40.00	69.67	Cukup
415	Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten	10.00	4.91	3.68	3.10	1.00	4.07	26.76	11.25	17.78	55.79	Cukup
416	Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	9.99	4.26	2.95	0.00	0.00	4.95	22.15	14.45	40.00	76.60	Baik
417	Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	24.71	40.00	79.64	Baik
418	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	Kabupaten	10.00	4.41	2.73	3.03	0.00	4.37	24.54	21.00	40.00	85.54	Baik
419	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene & Kepulauan	Kabupaten	6.69	5.00	3.16	0.00	1.00	4.65	20.50	20.00	35.56	76.06	Baik
420	Pemerintah Daerah Kabupaten Panai	Kabupaten	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	8.89	18.21	Kurang
421	Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten	10.00	4.92	0.00	0.00	1.00	4.89	20.81	4.29	35.56	60.66	Cukup
422	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman	Kabupaten	10.00	3.92	3.54	0.00	0.00	4.51	21.97	27.00	40.00	88.97	Baik
423	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	4.28	8.95	7.90	35.56	52.41	Cukup
424	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten	6.40	4.96	3.08	0.00	0.00	4.67	19.11	12.00	26.67	57.78	Cukup
425	Pemerintah Daerah Kabupaten Paser	Kabupaten	9.63	4.73	2.52	0.00	0.00	4.19	21.07	14.29	40.00	75.36	Baik
426	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	10.00	5.00	3.89	3.47	1.00	4.62	27.98	17.56	40.00	85.54	Baik
427	Pemerintah Daerah Kabupaten Pati	Kabupaten	10.00	5.00	4.19	2.78	0.00	4.46	26.43	17.50	40.00	83.93	Baik
428	Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak	Kabupaten	9.19	4.63	3.52	0.00	0.00	4.08	21.42	0.00	26.67	48.09	Kurang
429	Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	17.00	0.00	17.78	34.78	Kurang
430	Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan	Kabupaten	10.00	4.96	2.66	0.00	1.00	4.31	22.93	15.52	40.00	78.45	Baik
431	Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan	Kabupaten	10.00	3.64	0.00	0.00	1.00	3.78	18.42	4.29	35.56	58.27	Cukup
432	Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang	Kabupaten	10.00	5.00	3.53	3.29	1.00	4.00	26.82	22.50	40.00	89.32	Baik
433	Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten	9.50	5.00	2.92	2.83	1.00	3.28	24.53	7.83	35.56	67.92	Cukup
434	Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten	10.00	4.46	4.39	0.00	1.00	3.19	23.05	16.80	40.00	79.85	Baik
435	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran	Kabupaten	10.00	4.92	0.00	0.00	1.00	4.89	20.81	20.53	35.56	76.90	Baik
436	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten	9.96	4.88	0.00	0.00	0.00	4.08	18.92	4.29	22.22	45.43	Kurang
437	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten	10.00	5.00	3.71	0.00	0.00	4.30	23.01	16.50	40.00	79.51	Baik
438	Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie	Kabupaten	10.00	4.77	5.00	2.28	0.00	4.88	26.94	15.71	35.56	78.21	Baik
439	Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten	7.41	4.89	4.56	0.00	0.00	3.79	20.65	8.82	26.67	56.14	Cukup
440	Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	Kabupaten	10.00	4.97	3.58	0.00	0.00	4.33	22.88	13.64	35.56	72.08	Baik
441	Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato	Kabupaten	10.00	5.00	2.57	2.64	0.00	3.81	24.02	8.33	35.56	67.91	Cukup
442	Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten	10.00	4.10	0.00	0.00	0.00	3.66	17.76	14.52	40.00	72.28	Baik
443	Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	9.99	4.53	0.00	2.91	1.00	4.39	22.82	13.85	35.56	72.23	Baik
444	Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	Kabupaten	5.72	4.88	4.02	0.00	0.00	4.95	19.57	13.50	40.00	73.07	Baik
445	Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	Kabupaten	10.00	4.66	3.44	2.29	0.00	3.97	24.36	25.91	40.00	90.27	Sangat Baik
446	Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	10.00	4.49	3.28	2.15	1.00	4.67	25.59	23.79	35.56	84.94	Baik
447	Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten	7.66	5.00	4.39	0.00	0.00	4.34	21.39	15.00	35.56	71.95	Baik
448	Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	4.93	13.93	1.76	35.56	51.25	Cukup
449	Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak	Kabupaten	7.36	4.86	3.66	0.00	0.00	4.95	20.83	0.00	35.56	56.39	Cukup

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
450	Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten	10.00	5.00	4.47	0.00	0.00	5.00	24.47	0.00	31.11	55.58	Cukup
451	Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga	Kabupaten	10.00	5.00	4.55	3.03	1.00	4.51	28.09	8.89	40.00	76.98	Baik
452	Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	Kabupaten	8.21	4.16	3.72	2.74	1.00	4.67	24.50	16.67	40.00	81.17	Baik
453	Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.26	0.00	4.60	21.86	14.40	35.56	71.82	Baik
454	Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.89	14.89	0.00	35.56	50.45	Cukup
455	Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten	7.46	4.96	2.74	0.00	0.00	3.75	18.91	3.00	35.56	57.47	Cukup
456	Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	Kabupaten	10.00	4.93	3.32	0.00	1.00	4.11	23.36	21.25	40.00	84.61	Baik
457	Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten	7.23	4.71	4.48	0.00	0.00	4.89	21.31	7.00	35.56	63.88	Cukup
458	Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten	9.63	5.00	0.00	0.00	1.00	4.12	19.75	22.50	35.56	77.81	Baik
459	Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten	9.18	4.97	0.00	0.00	0.00	3.82	17.97	8.82	13.33	40.12	Kurang
460	Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.52	20.52	0.00	22.22	42.74	Kurang
461	Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.25	19.25	16.50	35.56	71.31	Baik
462	Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir	Kabupaten	10.00	4.97	3.15	0.00	1.00	2.88	22.00	17.65	31.11	70.76	Baik
463	Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	Kabupaten	10.00	5.00	3.80	0.00	0.00	4.40	23.20	8.08	35.56	66.84	Cukup
464	Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	2.53	1.00	4.17	27.70	22.26	40.00	89.96	Baik
465	Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi	Kabupaten	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	2.62	7.50	0.00	4.44	11.94	Kurang
466	Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun	Kabupaten	10.00	4.94	5.00	0.00	1.00	4.99	25.93	24.44	40.00	90.37	Sangat Baik
467	Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau	Kabupaten	9.36	5.00	5.00	3.08	0.00	2.96	25.40	21.43	40.00	86.83	Baik
468	Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma	Kabupaten	10.00	4.95	4.29	0.00	0.00	3.75	23.00	12.86	40.00	75.86	Baik
469	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	Kabupaten	10.00	5.00	3.21	3.21	1.00	4.92	27.34	21.60	40.00	88.94	Baik
470	Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat	Kabupaten	8.25	4.61	3.11	0.00	0.00	4.61	20.58	8.40	35.56	64.54	Cukup
471	Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten	9.99	4.87	3.58	0.00	0.00	2.67	21.11	30.00	35.56	86.67	Baik
472	Pemerintah Daerah Kabupaten Serang	Kabupaten	10.00	5.00	5.00	3.76	1.00	4.80	29.56	27.86	40.00	97.42	Sangat Baik
473	Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten	9.16	5.00	2.68	3.16	1.00	4.67	25.67	13.04	40.00	78.71	Baik
474	Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan	Kabupaten	10.00	4.15	3.87	0.00	0.00	4.56	22.57	10.50	35.56	68.63	Cukup
475	Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.10	1.00	3.87	21.97	26.36	40.00	88.33	Baik
476	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten	10.00	4.95	3.23	0.00	1.00	4.93	24.11	20.53	35.56	80.20	Baik
477	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	10.00	5.00	3.56	2.68	1.00	4.94	27.18	19.71	35.56	82.45	Baik
478	Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	Kabupaten	10.00	5.00	3.36	0.00	1.00	4.38	23.74	25.00	26.67	75.42	Baik
479	Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung	Kabupaten	10.00	5.00	4.57	0.00	0.00	4.03	23.60	15.79	35.56	74.95	Baik
480	Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka	Kabupaten	10.00	4.98	3.70	0.00	0.00	4.89	23.57	26.25	40.00	89.82	Baik
481	Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun	Kabupaten	7.31	5.00	0.00	0.00	1.00	3.41	16.72	28.64	35.56	80.92	Baik
482	Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue	Kabupaten	8.44	4.87	0.00	0.00	1.00	3.87	18.18	4.61	26.67	49.46	Kurang
483	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Kabupaten	9.74	5.00	3.00	0.00	0.00	4.13	21.87	7.69	35.56	65.12	Cukup
484	Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.38	0.00	4.93	22.31	30.00	35.56	87.87	Baik
485	Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	Kabupaten	10.00	5.00	3.34	3.17	1.00	4.98	27.49	12.00	40.00	79.49	Baik
486	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Kabupaten	10.00	4.93	3.52	0.00	1.00	4.85	24.30	19.59	40.00	83.89	Baik
487	Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	Kabupaten	9.39	5.00	4.54	0.00	0.00	4.43	23.36	9.55	40.00	72.91	Baik
488	Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten	6.24	4.90	3.80	2.80	1.00	4.31	23.04	20.00	40.00	83.04	Baik
489	Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	Kabupaten	10.00	4.88	0.00	0.00	0.00	3.23	18.11	21.00	40.00	79.11	Baik
490	Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong	Kabupaten	0.00	4.93	4.21	0.00	0.00	3.45	12.59	0.00	35.56	48.15	Kurang
491	Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	Kurang
492	Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	Kabupaten	10.00	5.00	2.51	0.00	0.00	4.79	22.30	26.40	40.00	88.70	Baik
493	Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	Kabupaten	7.30	4.97	4.38	2.98	1.00	4.35	24.98	25.46	40.00	90.44	Sangat Baik
494	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Kabupaten	7.96	4.79	3.96	0.00	1.00	4.49	22.20	19.74	40.00	81.94	Baik
495	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara	Kabupaten	10.00	4.97	3.70	2.82	0.00	4.14	25.63	13.13	35.56	74.32	Baik
496	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	10.00	5.00	2.55	3.29	0.00	4.47	25.31	16.16	40.00	81.47	Baik
497	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten	10.00	4.93	2.89	0.00	0.00	4.25	22.07	0.00	22.22	44.29	Kurang
498	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten	6.85	4.83	0.00	0.00	0.00	4.90	16.58	24.00	22.22	62.80	Cukup
499	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten	6.58	5.00	3.77	0.00	0.00	4.66	20.01	0.00	13.33	33.34	Kurang
500	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	2.17	7.06	12.00	26.67	45.73	Kurang
501	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Kabupaten	8.70	4.69	2.68	0.00	0.00	3.37	19.44	30.00	40.00	89.44	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITPK	Predikat
502	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten	8.38	4.93	0.00	0.00	0.00	4.12	17.43	16.80	35.56	69.79	Cukup
503	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	Kabupaten	10.00	5.00	3.95	0.00	1.00	4.99	24.94	18.00	40.00	82.94	Baik
504	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	Kabupaten	10.00	5.00	2.60	2.03	1.00	4.32	24.95	9.55	40.00	74.50	Baik
505	Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori	Kabupaten	0.00	4.72	4.59	0.00	0.00	4.87	14.18	0.00	13.33	27.51	Kurang
506	Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong	Kabupaten	10.00	4.87	3.85	3.33	1.00	4.80	27.85	23.33	40.00	91.18	Sangat Baik
507	Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	Kabupaten	10.00	5.00	4.52	3.71	1.00	4.11	28.34	26.90	40.00	95.24	Sangat Baik
508	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	Kabupaten	9.90	5.00	5.00	0.00	1.00	4.15	25.05	9.38	31.11	65.54	Cukup
509	Pemerintah Daerah Kabupaten Taliabu	Kabupaten	5.70	4.51	4.15	0.00	0.00	4.93	19.29	11.05	35.56	65.90	Cukup
510	Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau	Kabupaten	0.00	5.00	4.20	0.00	0.00	3.84	13.04	0.00	0.00	13.04	Kurang
511	Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.93	18.93	15.00	35.56	69.49	Cukup
512	Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	2.78	18.78	9.00	17.78	45.56	Kurang
513	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	2.30	0.00	4.48	21.78	25.56	40.00	87.34	Baik
514	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten	10.00	4.86	0.00	0.00	0.00	4.45	19.31	18.33	40.00	77.64	Baik
515	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten	10.00	5.00	3.32	2.51	1.00	3.97	25.80	21.92	40.00	87.72	Baik
516	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.84	19.84	30.00	40.00	89.84	Baik
517	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	Kabupaten	10.00	4.76	0.00	0.00	0.00	3.93	18.69	6.67	26.67	52.03	Cukup
518	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten	10.00	4.67	5.00	0.00	1.00	4.14	24.81	6.00	31.11	61.92	Cukup
519	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten	10.00	5.00	4.53	3.79	1.00	4.13	28.46	15.52	40.00	83.98	Baik
520	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten	8.97	4.87	3.99	2.02	0.00	4.01	23.86	8.57	8.89	41.32	Kurang
521	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	2.36	0.00	2.11	19.40	12.50	17.78	49.68	Kurang
522	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	10.00	4.93	0.00	0.00	1.00	4.96	20.89	4.29	22.22	47.40	Kurang
523	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Kabupaten	10.00	4.40	0.00	2.75	1.00	4.85	23.00	23.18	40.00	86.18	Baik
524	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten	6.91	4.98	3.73	0.00	1.00	4.68	21.30	7.50	40.00	68.80	Cukup
525	Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo	Kabupaten	10.00	4.99	4.63	0.00	1.00	4.44	25.06	15.65	31.11	71.82	Baik
526	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.28	20.28	20.00	40.00	80.28	Baik
527	Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.65	8.65	0.00	26.67	35.32	Kurang
528	Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama	Kabupaten	0.00	4.62	4.11	0.00	0.00	4.99	13.72	0.00	26.67	40.39	Kurang
529	Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Kabupaten	10.00	5.00	4.20	3.14	1.00	4.75	28.09	22.80	40.00	90.89	Sangat Baik
530	Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten	6.25	4.99	0.00	0.00	1.00	2.55	14.79	19.09	35.56	69.44	Cukup
531	Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten	10.00	4.95	4.98	0.00	0.00	3.86	23.79	15.00	35.56	74.35	Baik
532	Pemerintah Daerah Kabupaten Toba	Kabupaten	10.00	4.92	0.00	0.00	0.00	3.79	18.71	5.45	13.33	37.50	Kurang
533	Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten	10.00	5.00	4.16	0.00	1.00	3.85	24.01	23.08	40.00	87.09	Baik
534	Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli	Kabupaten	10.00	4.95	3.84	0.00	0.00	4.83	23.62	15.00	40.00	78.62	Baik
535	Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara	Kabupaten	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	5.00	7.68	0.00	4.44	12.12	Kurang
536	Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten	10.00	4.94	3.11	0.00	1.00	4.01	23.06	15.00	35.56	73.62	Baik
537	Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	10.00	5.00	3.37	3.31	1.00	4.82	27.50	15.00	40.00	82.50	Baik
538	Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban	Kabupaten	10.00	4.93	3.23	0.00	1.00	4.44	23.60	22.86	40.00	86.46	Baik
539	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	18.75	40.00	78.75	Baik
540	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten	10.00	4.01	0.00	0.00	1.00	2.41	17.42	12.86	35.56	65.84	Cukup
541	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	10.00	4.92	2.76	3.23	1.00	3.80	25.71	18.00	40.00	83.71	Baik
542	Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo	Kabupaten	8.11	5.00	0.00	0.00	0.00	3.89	17.00	1.76	35.56	54.32	Cukup
543	Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi	Kabupaten	10.00	4.81	2.75	0.00	0.00	4.41	21.97	13.33	35.56	70.86	Baik
544	Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen	Kabupaten	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	9.00	0.00	8.89	17.89	Kurang
545	Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	Kabupaten	10.00	5.00	2.82	3.26	0.00	4.97	26.05	22.80	31.11	79.96	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
546	Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri	Kabupaten	10.00	4.98	0.00	2.41	1.00	4.77	23.16	17.42	40.00	80.58	Baik
547	Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo	Kabupaten	10.00	4.62	2.81	0.00	1.00	4.93	23.36	25.20	40.00	88.56	Baik
548	Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo	Kabupaten	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4.44	14.44	Kurang
549	Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo	Kabupaten	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.54	0.00	0.00	12.54	Kurang
550	Pemerintah Daerah Kota Ambon	Kota	10.00	4.73	4.05	0.00	0.00	3.51	22.29	30.00	40.00	92.29	Sangat Baik
551	Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	Kota	10.00	4.96	3.88	0.00	0.00	4.40	23.24	14.65	40.00	77.89	Baik
552	Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.02	19.02	10.43	40.00	69.45	Cukup
553	Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	Kota	9.60	5.00	2.94	0.00	1.00	4.07	22.61	6.32	40.00	68.93	Cukup
554	Pemerintah Daerah Kota Bandung	Kota	10.00	4.82	3.50	2.25	1.00	4.60	26.17	18.84	40.00	85.01	Baik
555	Pemerintah Daerah Kota Banjar	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.59	20.59	20.00	40.00	80.59	Baik
556	Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Kota	10.00	4.98	4.03	3.25	0.00	4.63	26.89	15.65	40.00	82.54	Baik
557	Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin	Kota	10.00	5.00	4.11	2.86	1.00	4.92	27.89	23.18	40.00	91.07	Sangat Baik
558	Pemerintah Daerah Kota Batam	Kota	10.00	5.00	3.64	2.67	1.00	4.74	27.05	21.75	40.00	88.80	Baik
559	Pemerintah Daerah Kota Batu	Kota	10.00	5.00	4.30	2.57	1.00	4.33	27.20	10.25	35.56	73.01	Baik
560	Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau	Kota	9.99	4.94	0.00	2.04	0.00	4.53	21.51	8.08	35.56	65.15	Cukup
561	Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Kota	10.00	4.41	4.05	2.56	1.00	4.82	26.84	23.57	40.00	90.41	Sangat Baik
562	Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	Kota	10.00	5.00	3.75	2.44	1.00	3.19	25.38	15.79	35.56	76.73	Baik
563	Pemerintah Daerah Kota Bima	Kota	9.46	4.73	3.22	0.00	1.00	4.09	22.50	30.00	40.00	92.50	Sangat Baik
564	Pemerintah Daerah Kota Binjai	Kota	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	11.00	9.00	35.56	55.56	Cukup
565	Pemerintah Daerah Kota Bitung	Kota	10.00	3.62	0.00	0.00	0.00	3.28	16.90	9.00	40.00	65.90	Cukup
566	Pemerintah Daerah Kota Blitar	Kota	10.00	5.00	4.33	3.47	1.00	4.84	28.64	21.92	40.00	90.56	Sangat Baik
567	Pemerintah Daerah Kota Bogor	Kota	10.00	5.00	4.15	3.69	1.00	5.00	28.84	10.00	40.00	78.84	Baik
568	Pemerintah Daerah Kota Bontang	Kota	10.00	5.00	3.84	3.12	1.00	3.84	26.80	20.30	40.00	87.10	Baik
569	Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi	Kota	10.00	5.00	0.00	3.13	0.00	4.78	22.91	20.45	35.56	78.92	Baik
570	Pemerintah Daerah Kota Cilegon	Kota	10.00	4.22	4.34	0.00	1.00	4.17	23.73	22.00	35.56	81.29	Baik
571	Pemerintah Daerah Kota Cimahi	Kota	10.00	5.00	3.99	3.20	1.00	3.48	26.67	16.67	40.00	83.34	Baik
572	Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kota	10.00	0.00	0.00	2.55	1.00	4.68	18.23	17.84	40.00	76.07	Baik
573	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	Kota	10.00	5.00	4.70	3.98	1.00	5.00	29.68	30.00	40.00	99.68	Sangat Baik
574	Pemerintah Daerah Kota Depok	Kota	10.00	5.00	3.33	0.00	1.00	4.63	23.96	24.75	40.00	88.71	Baik
575	Pemerintah Daerah Kota Dumai	Kota	10.00	4.99	3.55	0.00	1.00	4.84	24.38	25.00	35.56	84.94	Baik
576	Pemerintah Daerah Kota Gorontalo	Kota	10.00	5.00	3.25	0.00	1.00	3.47	22.72	10.00	40.00	72.72	Baik
577	Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli	Kota	10.00	4.86	0.00	2.70	0.00	3.66	21.22	9.31	40.00	70.53	Baik
578	Pemerintah Daerah Kota Jambi	Kota	10.00	5.00	4.05	3.24	1.00	4.25	27.54	16.88	40.00	84.42	Baik
579	Pemerintah Daerah Kota Jayapura	Kota	10.00	4.73	2.61	2.42	1.00	4.58	25.34	12.50	40.00	77.84	Baik
580	Pemerintah Daerah Kota Kediri	Kota	9.59	3.89	0.00	0.00	1.00	4.99	19.47	23.75	35.56	78.78	Baik
581	Pemerintah Daerah Kota Kendari	Kota	10.00	4.80	2.76	0.00	0.00	4.37	21.93	18.57	40.00	80.50	Baik
582	Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu	Kota	7.87	4.62	3.09	0.00	0.00	3.75	19.33	30.00	35.56	84.89	Baik
583	Pemerintah Daerah Kota Kupang	Kota	8.12	4.97	3.65	0.00	1.00	4.06	21.80	16.16	35.56	73.52	Baik
584	Pemerintah Daerah Kota Langsa	Kota	10.00	5.00	3.55	0.00	0.00	4.63	23.18	21.00	31.11	75.29	Baik
585	Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe	Kota	10.00	4.96	5.00	0.00	0.00	4.36	24.32	3.33	35.56	63.21	Cukup
586	Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau	Kota	10.00	5.00	3.67	0.00	0.00	4.43	23.10	8.18	40.00	71.28	Baik
587	Pemerintah Daerah Kota Madiun	Kota	10.00	5.00	0.00	3.97	1.00	4.91	24.88	16.88	40.00	81.76	Baik
588	Pemerintah Daerah Kota Magelang	Kota	10.00	5.00	5.00	3.84	1.00	4.85	29.69	20.00	40.00	89.69	Baik
589	Pemerintah Daerah Kota Makassar	Kota	9.43	2.86	0.00	0.00	1.00	4.15	17.44	25.50	35.56	78.50	Baik
590	Pemerintah Daerah Kota Malang	Kota	10.00	5.00	0.00	2.19	1.00	4.51	22.70	21.60	40.00	84.30	Baik
591	Pemerintah Daerah Kota Manado	Kota	0.00	4.89	0.00	2.70	0.00	2.13	9.73	13.04	35.56	58.33	Cukup
592	Pemerintah Daerah Kota Mataram	Kota	10.00	4.73	0.00	0.00	1.00	4.05	19.78	12.00	40.00	71.79	Baik
593	Pemerintah Daerah Kota Medan	Kota	7.65	4.79	0.00	0.00	0.00	3.99	16.43	20.00	31.11	67.54	Cukup
594	Pemerintah Daerah Kota Metro	Kota	10.00	5.00	4.72	3.94	1.00	4.97	29.63	24.00	40.00	93.63	Sangat Baik
595	Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	Kota	10.00	5.00	5.00	3.75	1.00	4.71	29.46	18.75	40.00	88.21	Baik
596	Pemerintah Daerah Kota Padang	Kota	10.00	5.00	3.60	2.96	1.00	4.40	26.96	21.92	40.00	88.88	Baik
597	Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang	Kota	10.00	5.00	3.19	2.75	0.00	4.96	25.90	30.00	40.00	95.90	Sangat Baik
598	Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan	Kota	7.90	4.71	3.11	0.00	0.00	4.95	20.67	24.55	8.89	54.11	Cukup
599	Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam	Kota	10.00	4.70	0.00	0.00	1.00	3.37	19.07	8.82	40.00	67.89	Cukup
600	Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Kota	10.00	5.00	3.06	3.46	1.00	3.78	26.30	17.14	40.00	83.44	Baik
601	Pemerintah Daerah Kota Palembang	Kota	10.00	4.50	3.78	0.00	1.00	3.43	22.71	12.44	40.00	75.15	Baik
602	Pemerintah Daerah Kota Palopo	Kota	6.89	4.46	3.05	0.00	1.00	3.39	18.79	6.32	35.56	60.67	Cukup
603	Pemerintah Daerah Kota Palu	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.03	19.03	18.00	40.00	77.03	Baik
604	Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang	Kota	10.00	5.00	2.95	2.66	1.00	4.57	26.18	26.25	40.00	92.43	Sangat Baik
605	Pemerintah Daerah Kota Parepare	Kota	10.00	4.07	0.00	0.00	0.00	5.00	19.07	5.56	40.00	64.63	Cukup
606	Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Kota	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	14.36	10.91	35.56	60.83	Cukup
607	Pemerintah Daerah Kota Pasuruan	Kota	10.00	5.00	4.34	2.02	1.00	5.00	27.36	15.00	40.00	82.36	Baik
608	Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh	Kota	10.00	5.00	4.13	3.73	1.00	4.94	28.80	22.94	40.00	91.74	Sangat Baik
609	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Kota	10.00	5.00	3.74	0.00	1.00	4.89	24.63	20.00	35.56	80.19	Baik

No.	Nama Instansi	Jenis Instansi	SIRUP	e-Tendering	Non e-Tendering/ Non e-Purchasing	e-Katalog	Toko Daring	e-Kontrak	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor ITKP	Predikat
610	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Kota	10.00	4.90	0.00	0.00	1.00	3.95	19.85	22.80	35.56	78.21	Baik
611	Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar	Kota	9.73	4.64	3.84	3.13	1.00	3.31	25.64	18.95	40.00	84.59	Baik
612	Pemerintah Daerah Kota Pontianak	Kota	10.00	5.00	3.31	0.00	1.00	3.01	22.32	18.62	40.00	80.94	Baik
613	Pemerintah Daerah Kota Prabumulih	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	1.50	17.50	26.67	40.00	84.17	Baik
614	Pemerintah Daerah Kota Probolinggo	Kota	10.00	4.94	2.92	3.66	1.00	4.12	26.64	21.72	40.00	88.36	Baik
615	Pemerintah Daerah Kota Sabang	Kota	10.00	5.00	3.21	0.00	0.00	4.17	22.38	14.12	40.00	76.50	Baik
616	Pemerintah Daerah Kota Salatiga	Kota	10.00	4.90	0.00	0.00	1.00	4.65	20.55	15.00	40.00	75.55	Baik
617	Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	3.96	19.96	20.00	40.00	79.96	Baik
618	Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	Kota	10.00	3.99	3.59	2.64	0.00	4.24	24.46	20.77	40.00	85.23	Baik
619	Pemerintah Daerah Kota Semarang	Kota	10.00	5.00	4.23	0.00	1.00	4.56	24.79	24.71	40.00	89.50	Baik
620	Pemerintah Daerah Kota Serang	Kota	10.00	4.67	5.00	2.82	0.00	4.63	27.12	23.48	31.11	81.71	Baik
621	Pemerintah Daerah Kota Sibolga	Kota	10.00	3.42	0.00	0.00	0.00	3.63	17.05	16.16	13.33	46.54	Kurang
622	Pemerintah Daerah Kota Singkawang	Kota	10.00	5.00	5.00	3.18	1.00	4.99	29.17	17.37	40.00	86.54	Baik
623	Pemerintah Daerah Kota Solok	Kota	10.00	5.00	4.02	3.11	1.00	3.28	26.41	19.09	40.00	85.50	Baik
624	Pemerintah Daerah Kota Sorong	Kota	5.18	5.00	4.95	0.00	0.00	3.42	18.55	6.43	35.56	60.54	Cukup
625	Pemerintah Daerah Kota Subulussalam	Kota	9.01	5.00	4.43	0.00	1.00	4.48	23.92	2.50	40.00	66.42	Cukup
626	Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	Kota	10.00	3.77	0.00	3.04	1.00	4.99	22.79	10.50	40.00	73.29	Baik
627	Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh	Kota	9.57	4.93	5.00	0.00	1.00	5.00	25.50	8.18	17.78	51.46	Cukup
628	Pemerintah Daerah Kota Surabaya	Kota	10.00	5.00	5.00	2.60	1.00	4.87	28.47	16.61	40.00	85.08	Baik
629	Pemerintah Daerah Kota Surakarta	Kota	10.00	5.00	2.88	3.53	1.00	4.59	26.99	18.65	40.00	85.64	Baik
630	Pemerintah Daerah Kota Tangerang	Kota	10.00	5.00	4.62	3.96	1.00	4.97	29.55	26.59	40.00	96.14	Sangat Baik
631	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	Kota	10.00	5.00	3.19	2.21	1.00	4.53	25.93	14.00	40.00	79.93	Baik
632	Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai	Kota	10.00	5.00	3.24	0.00	0.00	4.20	22.44	19.29	35.56	77.29	Baik
633	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	Kota	9.97	5.00	3.24	2.02	1.00	4.70	25.93	15.00	40.00	80.93	Baik
634	Pemerintah Daerah Kota Tarakan	Kota	10.00	5.00	3.75	3.02	1.00	4.04	26.81	27.00	40.00	93.81	Sangat Baik
635	Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	Kota	9.81	5.00	2.73	0.00	1.00	4.93	23.47	7.74	40.00	71.21	Baik
636	Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi	Kota	10.00	5.00	4.15	3.46	1.00	4.95	28.56	9.47	40.00	78.03	Baik
637	Pemerintah Daerah Kota Tegal	Kota	10.00	4.81	4.81	3.46	1.00	4.88	28.95	16.88	40.00	85.83	Baik
638	Pemerintah Daerah Kota Ternate	Kota	8.69	4.64	5.00	0.00	0.00	3.81	22.14	6.00	40.00	68.14	Cukup
639	Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan	Kota	9.82	4.40	0.00	2.01	0.00	2.65	18.88	6.92	40.00	65.80	Cukup
640	Pemerintah Daerah Kota Tomohon	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.89	19.89	6.00	35.56	61.45	Cukup
641	Pemerintah Daerah Kota Tual	Kota	7.88	4.75	0.00	0.00	0.00	2.93	15.56	22.50	31.11	69.17	Cukup
642	Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta	Kota	10.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.89	20.89	23.33	40.00	84.22	Baik

Catatan: Mekanisme penilaian ITKP 2025 mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai Aspek Indikator Meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025.